



## **SAMBUTAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **S A M B U T A N**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya mengapresiasi diterbitkannya BUKU PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Data dan informasi yang disajikan dalam buku ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang telah berupaya menyusun buku ini saya mengucapkan terima kasih. Kepada semua instansi pemerintah dan swasta di daerah ini agar Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan, penyusunan program dan intervensi kegiatan baik di level daerah maupun nasional. Semoga akselerasi program ketahanan pangan lebih cepat, fokus dan tepat sasaran agar target pemerintah untuk pemerataan pertumbuhan pembangunan melalui penurunan stunting, kemiskinan dan kerentanan pangan dapat segera terwujud.

Terima kasih



## KATA PENGANTAR

Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam menyusun program, kebijakan serta pelaksanaan intervensi di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 18/202 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk membangun, menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan konprehensif tersebut disusunlah peta ketahanan pangan yang merupakan peta tematik, menggambarkan situasi pangan dan visualisasi dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan yang mencerminkan tiga aspek pangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 telah menyusun Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas- FSVA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 yang merupakan updating dari FSVA tahun 2020 , yang memuat hasil analisa terhadap indikator ketahanan dan kerentanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah sampai pada tingkat Kecamatan, dengan hasil dari 175 kecamatan di Provinsi Sulawesi Tengah di dapatkan sebanyak 41 kecamatan (25,71%) berada pada kondisi rentan terhadap kerawanan pangan (prioritas 1 – 3).

Dengan selesainya penyusunan buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan penetapan program, intervensi dan lokasi wilayah (kecamatan) dalam upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi di Provinsi Sulawesi Tengah.

KEPALA DINAS PANGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Ir. H. ABDULLAH KAWULUSAN., M.Si  
NIP.19620829 199003 1.006

## RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Provinsi merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah Kecamatan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah kecamatan. Sembilan indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Provinsi.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Ketersediaan Bersih Serealia. Indikator pada akses pangan adalah (1) Presentase Penduduk yang Hidup Dibawah Garis Kemiskinan; (2) Presentase RT dengan Proporsi Pengeluaran RT untuk Pangan >65% Terhadap Total; (3) Presentase RT Tanpa Akses Listrik. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Presentase RT Tanpa Akses ke Air Bersih; (2) Presentase Angka Kesakitan; (3) Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Tingkat Kepadatan; (4) Rata2 Lama Sekolah Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas; (5) Presentase Balita dengan Tinggi Badan di bawah Standar.
5. Kecamatan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Kecamatan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Kecamatan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.
6. Hasil analisis FSVA 2021 menunjukkan bahwa Kecamatan rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 41 Kecamatan dari 175 Kecamatan (25,71%) yang terdiri dari 4 Kecamatan (2,28%) Prioritas 1; 10 Kecamatan ( 5,71%) Prioritas 2; dan 27 Kecamatan ( 15,42%) Prioritas 3. Kecamatan prioritas 1 tersebar 1 Kecamatan di Kabupaten Banggai, 1 Kecamatan di Kabupaten Sigi; Kecamatan prioritas 2 tersebar 4 Kecamatan di Kabupaten Banggai, 1 Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong, 1 Kecamatan di Kabupaten Tojo Unauna, 1

Kecamatan di Kabupaten Sigi, 1 Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara dan 2 Kecamatan di Kota Palu; Kecamatan prioritas 3 Banggai Kepulauan ( 5 Kecamatan ), Kabupaten Banggai ( 4 kecamatan ), Kabupaten Poso ( 2 Kecamatan ), Kabupaten Donggala ( 3 Kecamatan ), Kabupaten Buol ( 2 Kecamatan ), Kabupaten Parigi Moutong ( 3 Kecamatan ), Kabupaten Tojo Unauna ( 5 Kecamatan ), Kabupaten Sigi (1 Kecamatan), Kabupaten Banggai Laut ( 1 Kecamatan ) dan Kabupaten Morowali Utara ( 1 Kecamatan ).

7. Karakteristik Kecamatan rentan pangan ditandai dengan Meningkatnya Persentase angka kesakitan, Tingginya Persentase penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan, Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih serealia, , Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting), .
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dalam menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
  - a. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah
  - b. Penyediaan pangan di daerah non sentra produksi, dan mengoptimalkan sumber daya lokal
  - c. Pemanfaatan lahan pertanian dan pekarangan secara optimal

## DAFTAR ISI

Halaman

### SAMBUTAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### KATA PENGANTAR

i

### RINGKASAN EKSEKUTIF

ii

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	2
1.3.	Metodologi	6
<b>BAB 2</b>	<b>KETERSEDIAAN PANGAN</b>	
2.1.	Rasio Konsumsi Normatif Terhadap Ketersediaan Netto Pangan Serealia	13
2.2	Produksi	14
2.3	Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan	19
<b>BAB 3</b>	<b>AKSES TERHADAP PANGAN</b>	
3.1.	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	20
3.2.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran	21
3.3	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.	23
3.4	Strategi peningkatan akses pangan	23
<b>BAB 4</b>	<b>PEMANFAATAN PANGAN</b>	
4.1	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	25
4.2.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	25
4.3.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk	26
4.4.	Persentase balita stunting	27
4.5.	Angka Kesakitan	27
4.6.	Dampak (Outcome) Dari Status Kesehatan	27
4.7	Strategi peningkatan pemanfaatan pangan	28
<b>BAB 5</b>	<b>KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT</b>	
5.1.	Kondisi Ketahanan Pangan	32
5.2.	Faktor Penyebab Kerentanan Pangan	35
<b>BAB 6</b>	<b>REKOMENDASI KEBIJAKAN</b>	
	LAMPIRAN	39
		37

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota dengan total penduduk sebesar 3.096.976 jiwa pada tahun 2020 dengan total luas 61.841,29 km<sup>2</sup>, Secara astronomis, Sulawesi Tengah terletak antara 2° 22' Lintang Utara dan 30 48' Lintang Selatan dan antara 119° 22'–124° 22' Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00, berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki batas-batas: Utara – Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo; Selatan – Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan; Barat – Selat Makassar; Timur – Provinsi Maluku. Secara klimatologi, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki pola tipe curah hujan tipe curah hujan tinggi yaitu terjadi pada bulan November sekitar 152,0 mm, data Curah Hujan (mm) adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir.

Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah tergantung pada sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Akan tetapi sektor ini pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 23,20 % menjadi 21,76 %. Penurunan ini disebabkan semua sub sektor yang ada dalam sektor Pertanian, mengalami penurunan peranan dan bencana alam. Selain sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan terdapat juga sektor konstruksi dari 11,32% menjadi 10,14 % ; Sementara sektor lainnya mengalami peningkatan yaitu Sektor Pengolahan dari 22,42 % menjadi 27,61%; sektor pertambangan dan penggalian dari 13,39% menjadi 13,40%. (Sumber : Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021).

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan, kerawanan pangan dan gizi. Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting

untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 dan 2020 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA Provinsi telah disusun sejak tahun 2010 dan dimutakhirkan pada tahun 2018 dan 2020. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah kecamatan, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Provinsi pada tahun 2021.

Seperti halnya FSVA Nasional FSVA Provinsi menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat kecamatan.

Pengembangan FSVA tingkat kecamatan merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Provinsi akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

## **1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi**

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk

menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

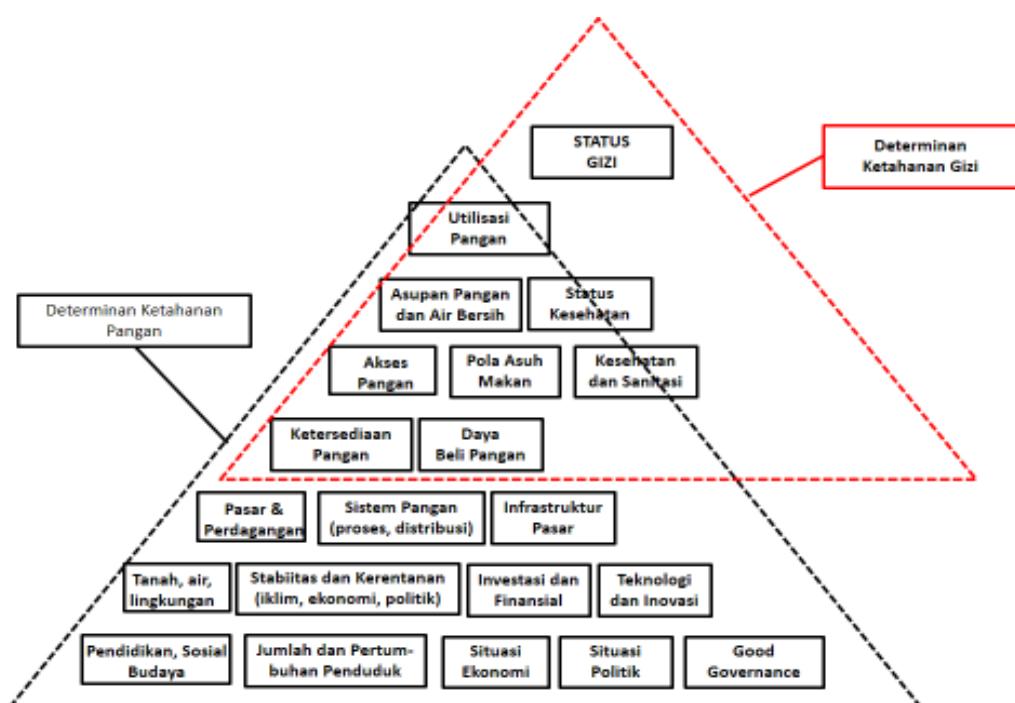
Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO<sup>1</sup> mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Commitee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

2013<sup>2</sup> juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

(Sumber: FAO dan UNSCN)

<sup>2</sup> Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

**Ketersediaan pangan** adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

**Akses pangan** adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

**Pemanfaatan pangan** merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga** dan **kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

**Dampak gizi dan kesehatan** merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah

dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

**Kerawanan pangan transien** adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

### 1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

#### Indikator

Indikator yang digunakan dalam FSVA Provinsi terdiri dari 9 (sembilan) indikator kronis dan tiga indikator transien. Data yang digunakan dalam penyusunan FSVA Provinsi dapat disesuaikan dengan ketersediaan data dan kesepakatan Tim FSVA Provinsi.

**Tabel 1.1. Indikator FSVA Provinsi tahun 2021**

Indikator	Definisi	Sumber Data
<b>I. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan dan Gizi Kronis</b>		
<b>A. Aspek Ketersediaan Pangan</b>		
1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih “beras + jagung + ubi jalar + ubi kayu”	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih serealia (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar). Konsumsi normatif serealia adalah 300 gram/kapita/hari.	– Dinas Pertanian Provinsi – Badan Pusat Statistik (Angka Tetap 2020)
<b>B. Aspek Akses terhadap Pangan</b>		
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan	Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak.	Dinas Sosial Provinsi, 2020
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran	Percentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk makanan lebih dari 65% dibandingkan dengan total pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan).	– SUSENAS, BPS (SAE, 2020)
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	Percentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik dari PLN dan/atau non PLN, misalnya generator.	– SUSENAS, BPS (SAE, 2020)

Indikator	Definisi	Sumber Data
<b>C. Aspek Pemanfaatan Pangan</b>		
5. Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 5 tahun	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.	– SUSENAS, BPS (SAE, 2020)
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dan air hujan (tidak termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m.	– SUSENAS, BPS (SAE, 2020)
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk	Total jumlah penduduk per jumlah tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapiannya fisik, dan tenaga keteknisian medis) dibandingkan dengan kepadatan penduduk.	– Dinas Kesehatan Provinsi, 2020
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar ( <i>stunting</i> )	Anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO, 2005).	– Data status gizi 2020, Dinas Kesehatan
9. Persentase angka kesakitan	Angka kesakitan/morbiditas/ persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa,	– SUSENAS, BPS (SAE, 2020)

Indikator	Definisi	Sumber Data
	termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.	

## II. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Transien

1. Bencana alam yang terkait iklim	Bencana alam yang terkait iklim dan perkiraan dampaknya terhadap ketahanan pangan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 2020
2. Variabilitas curah hujan	Perubahan curah hujan bulanan yang disebabkan oleh perubahan suhu permukaan laut sebesar 1 derajat celcius.	Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), 2020
3. Kehilangan produksi	Rata-rata hilangnya produksi tanaman pangan akibat banjir, kekeringan dan organisasi pengganggu tanaman (OPT).	Dinas Pertanian, 2020

## Metode Analisis

## 1. Analisis Indikator Individu

Penentuan jumlah *range* indikator individu menggunakan metode sebaran empiris atau mengikuti pengelompokan yang sudah ditetapkan aturan nasional atau internasional yang berlaku. Penetapan *range* delapan indikator mengikuti pola sebaran empiris. Satu indikator yaitu presentase balita *stunting* mengikuti aturan *World Health Organization* (WHO).

## 2. Analisis Komposit

Berdasarkan kesepakatan dalam Kelompok Kerja Teknis FSVA, pendekatan metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Gobal Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
  2. Menghitung skor komposit kecamatan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

Dimana:

$Y_j$  : Skor komposit kecamatan ke- $j$

$a_i$  : Bobot masing-masing indikator ke- $i$

$X_{ij}$ : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke- $i$  pada kecamatan ke- $j$   $i$  : Indikator ke 1, 2, ..., 9

j : Kecamatan ke 1, 2, ...dst

Besaran bobot masing-masing indikator berdasarkan rekomendasi para ahli (*expert judgement*) yang berasal dari akademisi dan pemerintah (Tabel 3.1). Khusus untuk analisis wilayah kecamatan di perkotaan hanya digunakan delapan (8) indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Oleh karena itu, pada perhitungan komposit wilayah kecamatan di perkotaan indikator rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih tidak digunakan. Nilai bobot 0,30 dari indikator aspek ketersediaan pangan kemudian dialihkan kepada 8 indikator lainnya secara proporsional berdasarkan masing-masing aspek. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

**Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu**

No	Indikator	Bobot	
		Kecamatan di Kabupaten	Kecamatan di Kota
<b>Aspek Ketersediaan Pangan</b>			
1.	Rasio kosumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari	0,30	-
	<b>Sub Total</b>	<b>0,30</b>	-
<b>Aspek Keterjangkauan Pangan</b>			
2.	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	0,15	0,20
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075	0,125
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075	0,125
	<b>Sub Total</b>	<b>0,30</b>	<b>0,45</b>
<b>Aspek Pemanfaatan Pangan</b>			
5	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15	0,18
6	Angka kesakitan	0,10	0,13
7	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	0,05	0,08
8	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05	0,08
9	Prevalensi balita <i>stunting</i>	0,05	0,08
	<b>Sub Total</b>	<b>0,40</b>	<b>0,55</b>

Mengelompokan kecamatan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing- masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

Dimana:

$K_j$  : *cut off point* komposit ke- $j$

$a_i$  : Bobot indikator ke- $i$

$C_{ij}$  : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-*i* komposit ke-*j*

i : indikator ke 1,2,3,.....9

j : komposit ke 1,2,3,... ..... 6

FSVA komposit menggunakan 6 prioritas. Pengelompokan prioritas komposit ketahanan pangan didasarkan pada sebaran nilai komposit dari masing- masing provinsi. Nilai *cut off point* komposit FSVA provinsi sebelumnya (2020) dapat dijadikan dasar pengelompokan nilai komposit di FSVA 2021. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan pangan wilayah yang paling tinggi (sangat rentan), sedangkan prioritas 6 menunjukkan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan yang paling baik (sangat tahan). Dengan kata lain, wilayah prioritas 1 memiliki tingkat risiko kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rentan rawan pangan, juga sebaliknya wilayah pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

### 3. Pemetaan

Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gradasi hijau menggambarkan variasi ketahanan pangan. Warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan. Prioritas 1 (sangat rentan) digambarkan oleh warna merah tua, sedangkan prioritas 6 (sangat tahan) digambarkan dengan warna hijau tua. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan *software QuantumGis*.

## **BAB 2**

### **KETERSEDIAAN PANGAN**

**Ketersediaan Pangan** adalah **ketersediaan pangan secara fisik** di suatu wilayah dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik (netto), perdagangan pangan dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah tersebut, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya. Aspek ketersediaan pangan dalam penyusunan FSVA didekati hanya pada aspek produksi pangan wilayah, sementara itu data perdagangan pangan, stok pedagang, dan bantuan pangan tidak semua tersedia pada tingkat kabupaten/kota.

Pangan meliputi produk serealia, kacang-kacangan, minyak nabati, sayur-sayuran, buah-buahan, rempah, gula, dan produk hewani. Karena porsi utama dari kebutuhan kalori harian berasal dari sumber pangan karbohidrat, yaitu sekitar separuh dari kebutuhan energi per orang per hari, maka yang digunakan dalam analisa kecukupan pangan yaitu karbohidrat yang bersumber dari produksi pangan pokok serealia, yaitu padi, jagung, dan umbi-umbian (ubi kayu dan ubi jalar) yang digunakan untuk memenuhi tingkat kecukupan pangan pada tingkat provinsi maupun kecamatan.

#### **2.1. Rasio Konsumsi Normatif Terhadap Ketersediaan Netto Pangan Serealia**

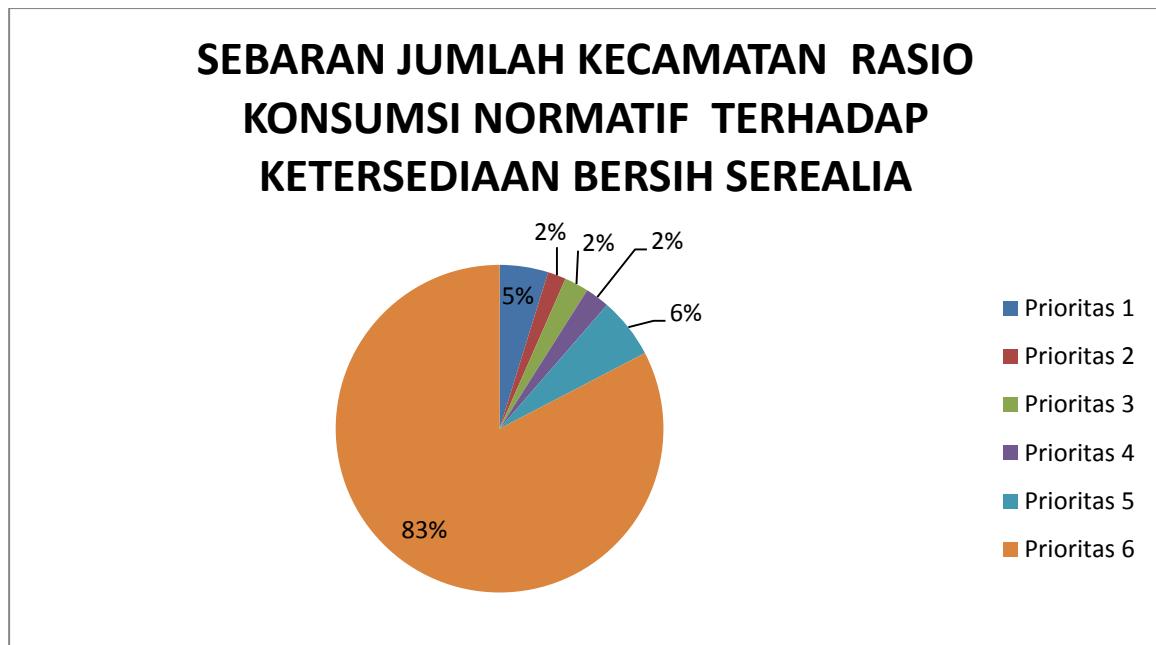
Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan netto pangan serealia per kapita per hari adalah merupakan petunjuk kecukupan pangan pada satu wilayah. Konsumsi Normatif ( $C_{norm}$ ) didefinisikan sebagai jumlah pangan serealia yang harus dikonsumsi oleh seseorang per hari untuk memperoleh kilo kalori energi dari serealia. Pola konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 50% dari kebutuhan total kalori berasal dari serealia. Standar kebutuhan kalori per hari per kapita adalah 2.150 Kkal, dan untuk mencapai 50% kebutuhan kalori dari serealia dan umbi-umbian (menurut angka Pola Pangan Harapan), maka seseorang harus mengkonsumsi kurang lebih 300 gram serealia per hari. Oleh sebab itu dalam analisis ini, kita memakai 300 gram sebagai nilai konsumsi normatif (konsumsi yang direkomendasikan).

Perlu dijelaskan bahwa dalam analisis ini dipilih penggunaan konsumsi normatif daripada penggunaan konsumsi aktual sehari-hari; karena konsumsi aktual (konsumsi sehari-hari) dipengaruhi oleh banyak hal di luar aspek ketersediaan pangan itu sendiri (misalnya: daya

beli, pasar dan infrastruktur jalan, kemampuan penyerapan serealia, kebiasaan/budaya, dll).

Dari 167 Kecamatan dan 8 Kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah, 4 Kecamatan masuk dalam prioritas 1 (4,57%) yaitu kecamatan yang kurang Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan netto pangan serealia per kapita per hari. Tersebar di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Banggai 5 kecamatan, kabupaten Parigi Moutong 2 Kecamatan dan Kabupaten Morowali Utara 1 Kecamatan, Prioritas sebanyak 3 Kecamatan tersebar di Kabupaten Banggai 1 Kecamatan dan Kabupaten Parigi Moutong 2 Kecamatan, Prioritas 3 sebanyak 4 Kecamatan tetsebar di Kabupaten Poso 2 kecamatan dan Kabupaten Parigi Moutong 2 Kecamatan.

## 2.1. Grafik sebaran jumlah desa terhadap rasio baku lahan sawah berdasarkan prioritas



## 2.2. Produksi

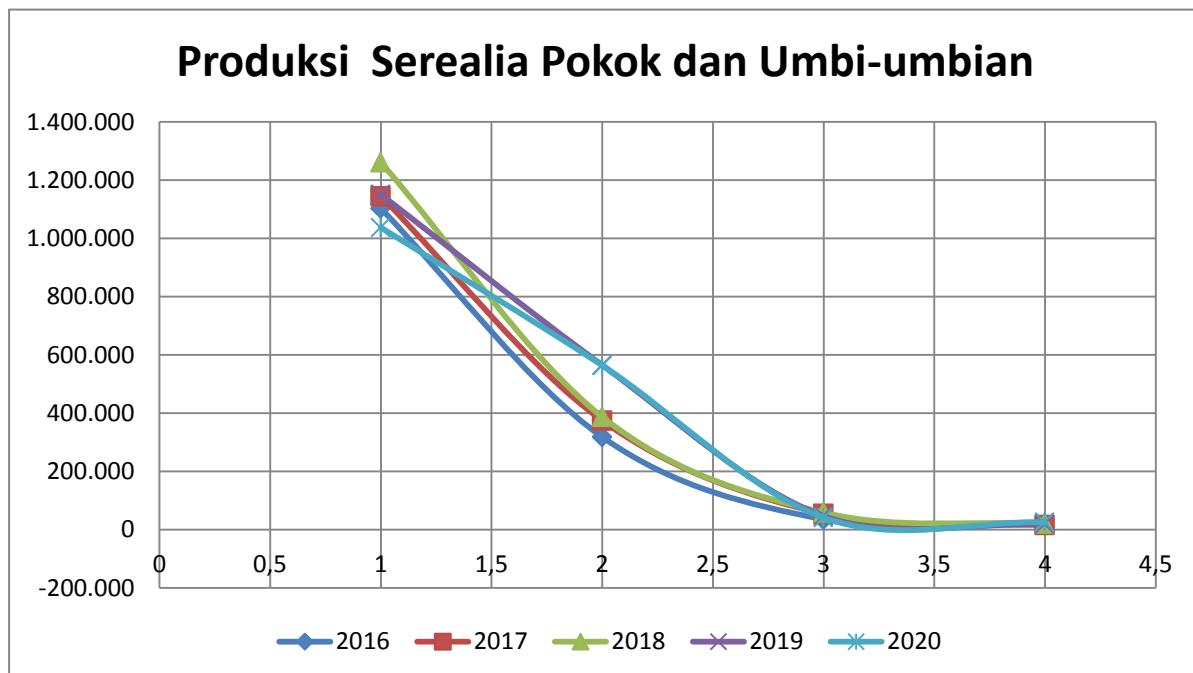
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 21,76 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Provinsi Sulawesi Tengah yang menyumbang hampir 96 % dari total produksi serealia Provinsi. Berdasarkan Tabel 2.2 dan Gambar 2.1, produksi umbi-

umbian di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sejak tahun 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya luas tanam dan peningkatan produktivitas. Produksi padi mengalami Penurunan 9,87 % dari tahun sebelumnya, yaitu dari pencapaian produksi 1.150.437 ton tahun 2019 menjadi 1.036.827 pada tahun 2020. (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Tabel 2.2 Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2016-2020 (Ton)

<b>Serelia</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Rata-rata 5 Tahun</b>
Padi	1,101,995	1,144,398	1,260,670	1,150,437	1,036,827	1,138,865
Jagung	317,716	374,322	386,606	564,404	563,428	441,295
Ubi Kayu	34,909	54,225	58,426	46,667	40,809	47,007
Ubi Jalar	15,735	15,464	19,791	19,072	25,701	19,153

*Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2016-2020*



Tahun 2020, total produksi serealia dan umbi-umbian mencapai 1.666.765 ton. Produksi Padi sebanyak 1.036.827 ton, Jagung sebanyak 563.428 ton, ubi kayu sebanyak 40.809 ton, dan ubi jalar sebanyak 25.701 ton.

## Padi

Produksi padi pada tingkat kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 tahun terakhir (2016-2020) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.4. Produksi padi mengalami penurunan pada tahun 2020 di Sembilan Kabupaten. Peningkatan terjadi di 3 kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Produksi padi tertinggi di Kabupaten Parigi Moutong sebesar 255.182 ton pada tahun 2020.

Tabel 2.4 Produksi Padi 2016 - 2020 (Ton)

NO	KABUPATEN	PRODUKSI				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BANGGAI KEPULAUAN	2.492	2.103	2.771	2.125	2.135
2	BANGGAI	212.900	215.622	242.908	235.364	213.758
3	MOROWALI	50.980	46.727	56.023	53.804	44.514
4	POSO	161.920	185.170	191.410	139.625	109.600
5	DONGGALA	93.829	107.643	120.420	120.356	99.907
6	TOLITOLI	75.511	94.178	91.616	115.023	113.261
7	BUOL	20.990	26.455	23.637	36.981	34.868
8	PARIGI MOUTONG	303.722	253.391	310.270	282.319	255.182
9	TOJO UNAUNA	8.526	7.352	8.159	11.882	13.754
10	SIGI	117.203	148.347	138.093	80.381	80.244
11	BANGGAI LAUT	-	-	-	-	-
12	MOROWALI UTARA	52.025	54.409	73.801	78.760	68.222
13	PALU	1.897	3.002	1.562	1.273	829
	<b>TOTAL</b>	<b>1.101.995</b>	<b>1.144.399</b>	<b>1.260.670</b>	<b>1.157.893</b>	<b>1.036.274</b>

*Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2020*

## Jagung

Pada tahun 2020, produksi jagung mencapai 563.428 ton. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan lima kali lipat dibandingkan tahun 2016. Pada Tahun 2020 terjadi penurunan produksi sebesar 976 ton dari 2019. Sebaran produksi jagung terbesar terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 564.404 ton. Kontribusi terbesar pada tahun 2020 terjadi di Kabupaten Buol sebesar 123.840 ton, menyusul Kabupaten Poso sebesar 84.245 ton dan terendah Kabupaten Banggai Laut sebesar 392 ton. Secara rinci produksi jagung tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Produksi Jagung 2016 - 2020 (Ton)

NO	KABUPATEN	PRODUKSI				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BANGGAI KEPULAUAN	3.029	2.443	9.559	2.751	2.870
2	BANGGAI	25.867	30.205	50.053	98.583	59.049
3	MOROWALI	5.025	2.898	7.083	5.283	8.549
4	POSO	32.660	53.888	77.515	54.449	84.245
5	DONGGALA	35.841	71.360	32.456	60.689	63.977
6	TOLITOLI	6.818	6.500	10.058	15.291	16.441
7	BUOL	48.064	67.632	56.102	94.401	123.840
8	PARIGI MOUTONG	41.210	31.234	26.254	65.253	57.801
9	TOJO UNAUNA	45.825	49.115	42.070	89.954	62.827
10	SIGI	51.410	37.785	52.022	56.174	60.406
11	BANGGAI LAUT	75	32	1563	1624	392
12	MOROWALI UTARA	17.462	17.108	18.595	15.470	21.042
13	PALU	4.430	4.121	3.276	2.486	1.805
	<b>TOTAL</b>	<b>317.716</b>	<b>374.321</b>	<b>386.606</b>	<b>562.408</b>	<b>563.244</b>

*Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2020*

## Ubi Kayu

Produksi ubi kayu penurunan dari 46.666 ton pada tahun 2019 menjadi 40.809 ton pada tahun 2020. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2020 meliputi Kabupaten Banggai. Rincian produksi ubi kayu tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Produksi Ubi Kayu 2016 - 2020 (Ton)

NO	KABUPATEN	PRODUKSI				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BANGGAI KEPULAUAN	2,364	4,092	3,338	4,195	3,963
2	BANGGAI	5,691	12,147	16,372	12,492	9,686
3	MOROWALI	2,045	3,280	4,298	4,186	4,438
4	POSO	5,163	6,232	11,512	7,626	5,581
5	DONGGALA	3,267	3,568	3,476	2,518	4,111
6	TOLITOLI	1,632	1,506	2,529	1,771	1,958
7	BUOL	387	481	426	174	178
8	PARIGI MOUTONG	4,181	5,053	6,294	5,021	3,329
9	TOJO UNAUNA	1,796	5,750	1,111	842	1,737
10	SIGI	3,956	5,281	2,107	2,489	1,325
11	BANGGAI LAUT	2663	4566	4089	3153	1,953
12	MOROWALI UTARA	1,258	927	1,899	1,516	2,013
13	PALU	507	1,341	975	683	537
	<b>TOTAL</b>	<b>34,910</b>	<b>54,224</b>	<b>58,426</b>	<b>46,666</b>	<b>40,809</b>

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2020

## Ubi Jalar

Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2016 - 2020) terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 25.701 ton. Kabupaten Poso merupakan penyumbang terbesar, yaitu sebesar 8.327 ton, Kabupaten Banggai sebesar 5.468 ton, Kabupaten Parigi Moutong sebesar 4.477 ton dan Kabupaten Donggala sebesar 1.878 ton. Rincian produksi ubi jalar tahun 2016 - 2020 disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Produksi Ubi Jalar 2016 - 2020 (Ton)

NO	KABUPATEN	PRODUKSI				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BANGGAI KEPULAUAN	574	821	730	1,056	1,454
2	BANGGAI	3,124	1,396	4,256	3,587	5,468
3	MOROWALI	770	554	644	775	1,253
4	POSO	2,040	4,164	5,698	7,043	8,327
5	DONGGALA	1,683	1,287	847	1,060	1,878
6	TOLITOLI	794	757	1,068	1,215	777
7	BUOL	185	118	48	27	49
8	PARIGI MOUTONG	2,966	3,861	4,227	2,539	4,477
9	TOJO UNAUNA	1,457	450	1,187	165	459
10	SIGI	1,455	1,364	687	505	571
11	BANGGAI LAUT	223	265	171	736	457
12	MOROWALI UTARA	419	361	215	355	532
13	PALU	44	65	13	9	0
	<b>TOTAL</b>	<b>15,734</b>	<b>15,463</b>	<b>19,791</b>	<b>19,072</b>	<b>25,701</b>

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2020

## 2.3. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

### **Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan**

Kebijakan Provinsi Sulawesi Tengah mengenai ketersediaan pangan bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas; (ii) perluasan lahan sawah; (iii) mengurangi dampak iklim-terkait resiko; (iv) memperkuat kelembagaan bagi petani. Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

- (i) Peningkatan produktivitas
  - a. Pendirian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SLPTT)
  - b. Perbaikan penggunaan varietas tanaman
  - c. Pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun bio hayati
  - d. Pengelolaan air
  - e. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian
- (ii) Perluasan lahan sawah
  - a. Pengembangan lahan sawah
  - b. Optimalisasi penggunaan lahan
  - c. Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)
  - d. Pembangunan sumur pompa dan dam/embung
- (iii) Pengurangan dampak iklim terkait resiko
  - a. Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman (OPT)
  - b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen
- (iv) Penguatan kelembagaan bagi petani
  - a. Kredit dan energi untuk ketahanan pangan
  - b. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
  - c. Pemasaran produk pertanian, misal TTI, dll

## **BAB 3**

### **AKSES TERHADAP PANGAN**

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Provinsi, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan; dan (2) Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran; (3) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.

#### **3.1 Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan**

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Rasio kemiskinan makin bertambah dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah mengalami Penurunan dari 19,09 % (382,775 ribu) tahun 2016, menjadi 13,06 % (483,662 ribu) tahun 2020.

Tabel 3.1 Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Persentase penduduk miskin	19,09	<b>14,22</b>	<b>13,69</b>	<b>13,18</b>	<b>13,06</b>

*Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka , BPS 2021*

Pada tingkat kecamatan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020 , terdapat 166 kecamatan yang memiliki Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, terdiri atas sebanyak 125 kecamatan dan 2 kelurahan (72,57%) Prioritas 1, Sebanyak 33 kecamatan (18,85%) masuk prioritas 2, dan 4 kecamatan (2,28 %) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Provinsi Sulawesi

Tengah ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 162 Kecamatan dan 2 Kelurahan tersebut.

Tabel 3.2 Sebaran kecamatan Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Jumlah Kecamatan/Kelurahan	Persentase
1	127	72,57
2	33	18,85
3	4	2,28

### **3.2 Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran**

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan suatu rumah tangga, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total pengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori Engel menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan mengalami penurunan. Shan (1994) menyatakan bahwa pengeluaran pangan merupakan proksi yang baik untuk pendapatan permanen, selain itu juga merupakan indikator yang penting untuk melihat malnutrisi kronis dalam jangka panjang. Menurut Suhardjo (1996) dan Azwar (2004) pangsa pengeluaran pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan, makin besar pangsa pengeluaran untuk pangan berarti ketahanan pangan semakin berkurang. Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil, demikian sebaliknya (Deaton dan Muellbauer 1980). Apabila distribusi pengeluaran untuk pangan lebih besar dari 65 persen dari total pengeluaran maka distribusi pengeluaran rumah tangga tersebut dikategorikan buruk (BKP dan WFP 2010; WFP 2009). Kerentanan pangan wilayah ditentukan oleh persentase jumlah rumah tangga yang memiliki distribusi pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran pada katagori buruk (lebih dari 65 persen).

Data yang digunakan dalam penyusunan FSVA Provinsi bersumber dari hasil SUSENAS yang diestimasi dengan SAE, 2020.

Dari Hasil analisis FSVA Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 2 kecamatan di Prioritas 2 (1,14 %) dan sebanyak 17 kecamatan (9,71%) priroritas 3.

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada modal kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

### **3.3 Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.**

Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan. Hal ini merupakan indikasi kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; Wiranthy *et al.* 2014; Sabarella 2005; dan Sofiati 2009). Rasio rumah tangga tanpa akses listrik diduga akan berpengaruh positif terhadap kerentanan pangan dan gizi.

Sumber data yang digunakan adalah data SUSENAS, BPS yang diestimasi menggunakan SAE.

### **3.4 Strategi Peningkatan Akses Pangan**

#### **Strategi Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Akses terhadap Pangan**

Strategi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 diantaranya:

- Peningkatan kapasitas produksi melalui pengembangan komoditas primer yang mampu menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya
- Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan kemandirian Desa
- Peningkatan ketersediaan infrastruktur : (Jalan, Jembatan, Energy dan Air)
- Mendorong kemandirian masyarakat perdesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai wujud Penanggulangan kemiskinan.

## **BAB 4**

### **PEMANFAATAN PANGAN**

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Provinsi, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun; (2) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih; (3) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk; (4) Persentase balita *stunting* dan (5) Angka Kesakitan.

#### **4.1 Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun**

Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan. Berbagai penelitian menunjukkan pengetahuan berhubungan erat dengan penyerapan pangan dan ketahanan pangan (Khan dan Gill 2009; Arif 2005; Molnar 1999; dan Mahmood *et al.* 1991).

Dari Hasil Analisis FSVA terdapat 2 Kecamatan di prioritas 1, Prioritas 2 sebanyak 5 kecamatan dan prioritas 3 sebanyak 33 kecamatan.

Sumber data yang digunakan adalah data Susenas dari BPS yang diestimasi menggunakan SAE. Sumber data lain adalah Dinas Pendidikan Provinsi, 2020.

#### **4.2 Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih**

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak<sup>4</sup>. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan

angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel 4.1 Sebaran kecamatan berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Jumlah Kecamatan	Percentase
1	30	17,14
2	14	8
3	24	13,71

#### 4.3 Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk

Indikator ini mengukur sejauh mana kesesuaian ketersediaan tenaga kesehatan dan jumlah masyarakat yang dilayani. Tenaga kesehatan terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan (Lubis 2010 dan Sofiati 2009). Indikator ini dihitung dengan membagi jumlah penduduk di suatu wilayah dengan jumlah tenaga kesehatan. Hasilnya kemudian dibagi dengan kepadatan penduduk untuk memperoleh jumlah populasi terkoreksi yang dilayani per tenaga kesehatan. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin rentan daerah tersebut.

Data tenaga kesehatan bersumber dari Profil Tenaga Kesehatan 2020, Dinas Kesehatan.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbidity) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 3.2 Sebaran rasio tenaga kesehatan di kecamatan berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Jumlah Kecamatan	Percentase
1	5	2,85
2	4	2,28
3	3	1,71

#### **4.4 Persentase balita *stunting***

Balita gizi kurang adalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (BBU).

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok Penyerapan Pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita adalah situasi ketahanan pangan rumah tangga, status gizi dan kesehatan ibu, pendidikan ibu, pola asuh anak, akses terhadap air bersih, akses terhadap pelayanan kesehatan yang tepat waktu. Untuk mengetahui apakah balita memiliki tinggi badan kurang atau tidak, maka harus dilakukan pengukuran tinggi badan dan pencatatan umur dalam bulan. Angka ini kemudian dibandingkan dengan standar internasional yang dikembangkan oleh badan “*National Centre for Health Statistics, Centers for Disease Control, USA* (atau biasa disebut NCHS standard).

Dari hasil analisis FSVA didapatkan 9 kecamatan yang termasuk prioritas 1, prioritas 2 sebanyak 19 kecamatan dan prioritas 3 sebanyak 43 kecamatan.

Sumber data berasal dari data status gizi 2020, Dinas Kesehatan.

#### **4.5 Angka Kesakitan**

Angka kesakitan/morbiditas/persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu.

Dari hasil analisis FSVA didapatkan 46 kecamatan yang termasuk prioritas 1, prioritas 2 sebanyak 41 kecamatan dan prioritas 3 sebanyak 21 kecamatan.

Sumber data yang digunakan adalah data Susenas dari BPS yang diestimasi dengan menggunakan metode SAE. Sumber data lain adalah data dari Dinas Kesehatan, 2020.

#### **4.6 Dampak (Outcome) Dari Status Kesehatan**

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan underweight (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median

- menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau stunting (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
  3. Kurus atau wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

#### **4.7 Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan**

##### **Strategi Untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan Kelompok Rentan**

Masalah gizi kronis (stunting) masih tetap menjadi perhatian utama di Provinsi Sulawesi Tengah, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen

serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
  - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pad anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
  - b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
  - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan Air Susu Ibu (ASI) untuk bayi mereka.
  - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).  
Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.
  - a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
    - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan

kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.

- Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI ekslusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
  - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
  - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
  - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.
  - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga

berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

## **BAB 5**

### **KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT**

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 9 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (lampiran) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

#### **5.1. Kondisi Ketahanan Pangan**

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (desa) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, berdasarkan kecamatan-kecamatan dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 4, 5, 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (kecamatan) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (kecamatan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (kecamatan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (kecamatan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis, dari 175 kecamatan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah maka didapatkan 4 kecamatan Prioritas 1 (2,28%), 10 kecamatan Prioritas 2 (5,71%), 27 kecamatan Prioritas 3 (15,42%), 60 kecamatan Prioritas 4 (34,28%), 53 kecamatan Prioritas 5 (30,28) dan 21 kecamatan Prioritas 6 (12%).

Dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi penurunan pada prioritas 1 dan 2, pada prioritas 1 tahun 2020 sebanyak 8 Kecamatan menjadi 4 Kecamatan tahun 2021, tahun 2020 prioritas 2 sebanyak 15 kecamatan menjadi 10 kecamatan pada tahun 2021 dan pada prioritas 3 terjadi kenaikan yang pada tahun 2020 sebanyak 22 kecamatan menjadi 27 kecamatan pada 2021.

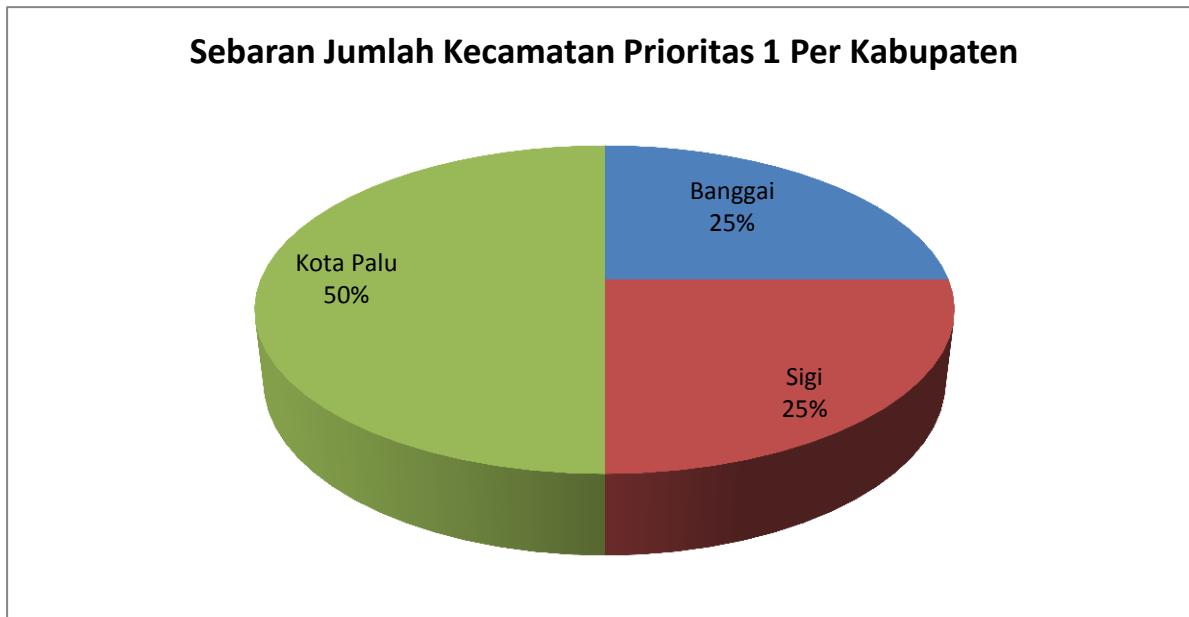
Ini disebabkan karena terjadi penurunan pada Persentase Balita dengan tinggi badan dibawah standar (stunting) dan pada indikator aspek ketersediaan pangan dengan adanya

tambahan data Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) membuat aspek ini menjadi baik hasilnya ketika di analisis.

**Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Kecamatan Prioritas 1-3**

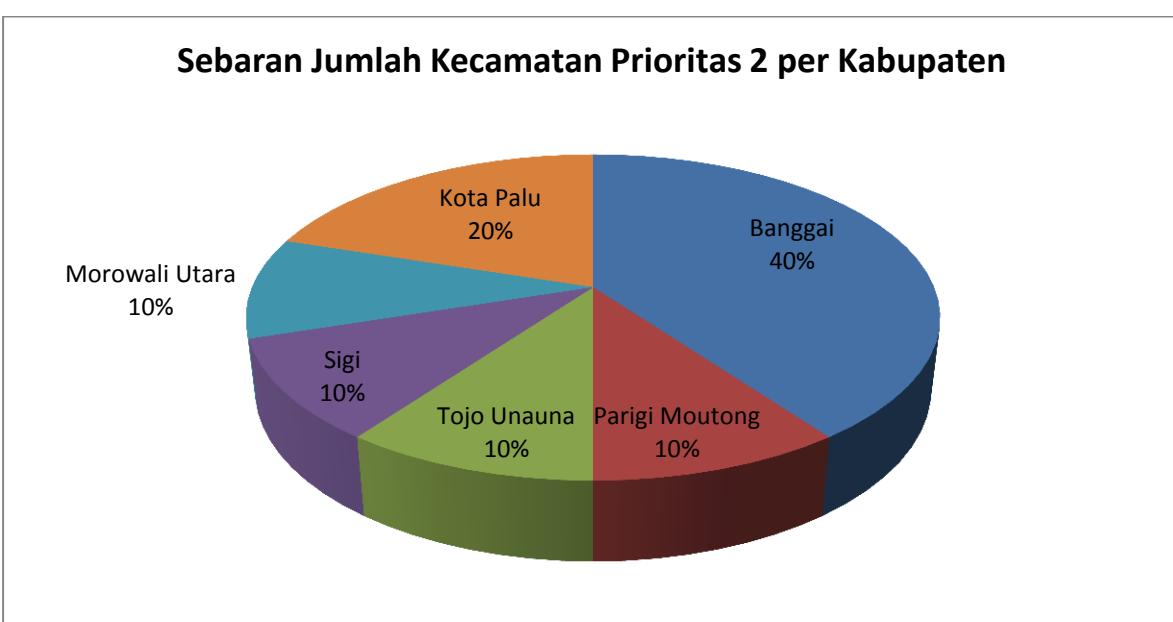
Prioritas	Kabupaten	Kecamatan	Percentase
1	Banggai	1. Kintom	2,28 %
	Sigi	1. Marawola Barat	
	Kota Palu	1. Ulujadi 2. Tawaeli	
2	Banggai	1. Luwuk 2. Luwuk Utara 3. Luwuk Selatan 4. Nambo	5,71 %
	Parigi Moutong	1. Tinombo	
	Tojo Unauna	1. Batudaka	
	Sigi	1. Kinovaro	
	Morowali Utara	1. Petasia	
	Kota Palu	1. Tatanga 2. Palu Utara	
	Banggai Kepulauan	1. Totikum Selatan 2. Bulagi 3. Bulagi Selatan 4. Bulagi Utara 5. Buko selatan	
3	Banggai	1. Batui Selatan 2. Pagimana 3. Lobu 4. Balantak Utara	15,42%
	Poso	1. Lore Tengah 2. Lore Peore	
	Donggala	1. Pinembani 2. Sindue Tombusabora 3. Balaesang Tanjung	
	Buol	1. Karamat 2. Bunobogu	
	Parigi Moutong	1. Parigi Selatan 2. Toribulu 3. Palasa	
	Tojo Unauna	1. Ulubongka 2. Una-Una 3. Togean 4. Walea Kepulauan 5. Talatako	
	Sigi	1. Kulawi Selatan	
	Banggai Laut	1. Labobo	
	Morowali Utara	1. Petasia Barat	

Kecamatan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 terdapat di wilayah Kabupaten Banggai ( 1 Kecamatan ), Kabupaten Sigi ( 1 kecamatan ) dan Kota Palu ( 2 Kecamatan ) (Gambar 5.1).



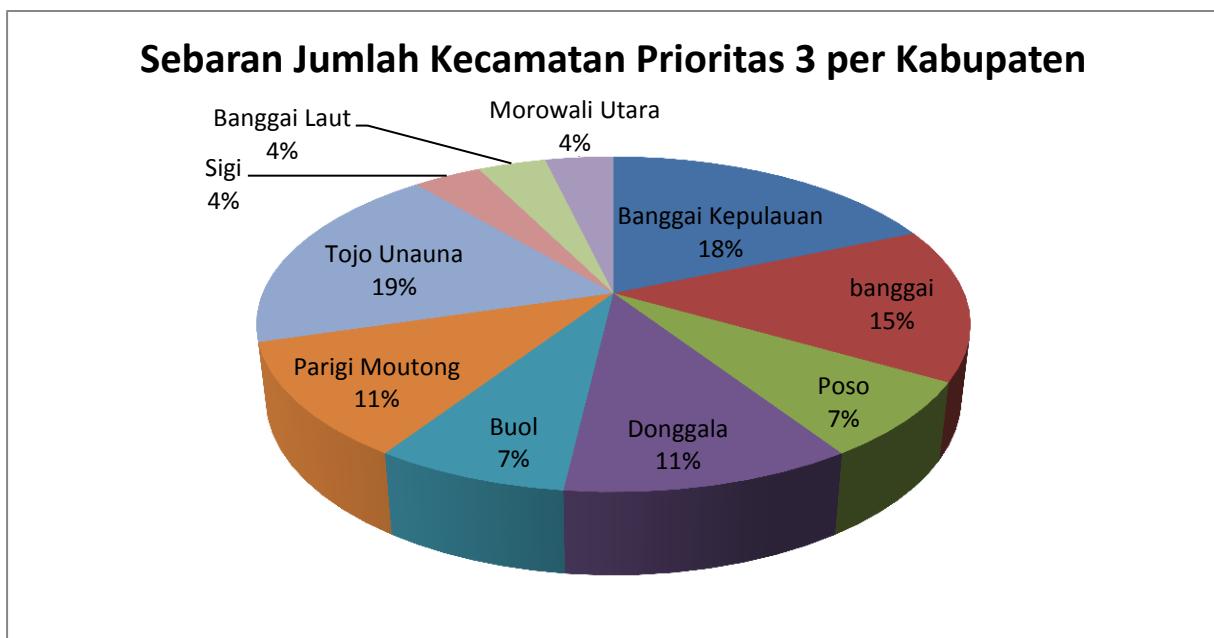
Gambar 5.1 Sebaran Jumlah Kecamatan Prioritas 1 Per Kabupaten

Kecamatan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kabupaten Banggai ( 4 Kecamatan ), Kabupaten Parigi Moutong (1 kecamatan ), Kabupaten Tojo Unauna ( 1 Kecamatan ), Kabupaten Sigi ( 1 Kecamatan ), Kabupaten Morowali Utara ( 1 Kecamatan ) dan Kota Palu ( 2 Kecamatan ) (Gambar 5.2).



Gambar 5.2 Sebaran Jumlah Kecamatan Prioritas 2 per Kabupaten

Kecamatan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan ( 5 Kecamatan ), Kabupaten Banggai ( 4 kecamatan ), Kabupaten Poso ( 2 Kecamatan ), Kabupaten Donggala ( 3 Kecamatan ), Kabupaten Buol ( 2 Kecamatan ), Kabupaten Parigi Moutong ( 3 Kecamatan ), Kabupaten Tojo Unauna ( 5 Kecamatan ), Kabupaten Sigi (1 Kecamatan), Kabupaten Banggai Laut ( 1 Kecamatan ) dan Kabupaten Morowali Utara ( 1 Kecamatan ) (Gambar 5.3).



Gambar 5.3. Sebaran Jumlah Desa Prioritas 3 Per Kecamatan

## 5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan

**Kecamatan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1 secara umum disebabkan oleh:**

1. Presentase Angka Kesakitan
2. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan
3. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
4. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar
5. Rasio Konsumsi Normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih serelia

**Kecamatan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 secara umum disebabkan oleh:**

1. Presentase Angka Kesakitan
2. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan

3. Rasio Konsumsi Normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih serelia
4. Persentase Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran terhadap pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran
5. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih

**Kecamatan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh:**

1. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan
2. Presentase Angka Kesakitan
3. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
4. Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 5 tahun
5. Persentase Balita dengan tinggi badan dibawah standar (stunting)

## BAB 6

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (Kecamatan), dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah kecamatan diprioritaskan pada:

- a. Kecamatan-kecamatan prioritas 1-3 yang tersebar di Beberapa Kabupaten
- b. Kecamatan-kecamatan yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain
- c. Kecamatan di Kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- d. Kecamatan pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di Kecamatan seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

**Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan**



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada kegiatan:

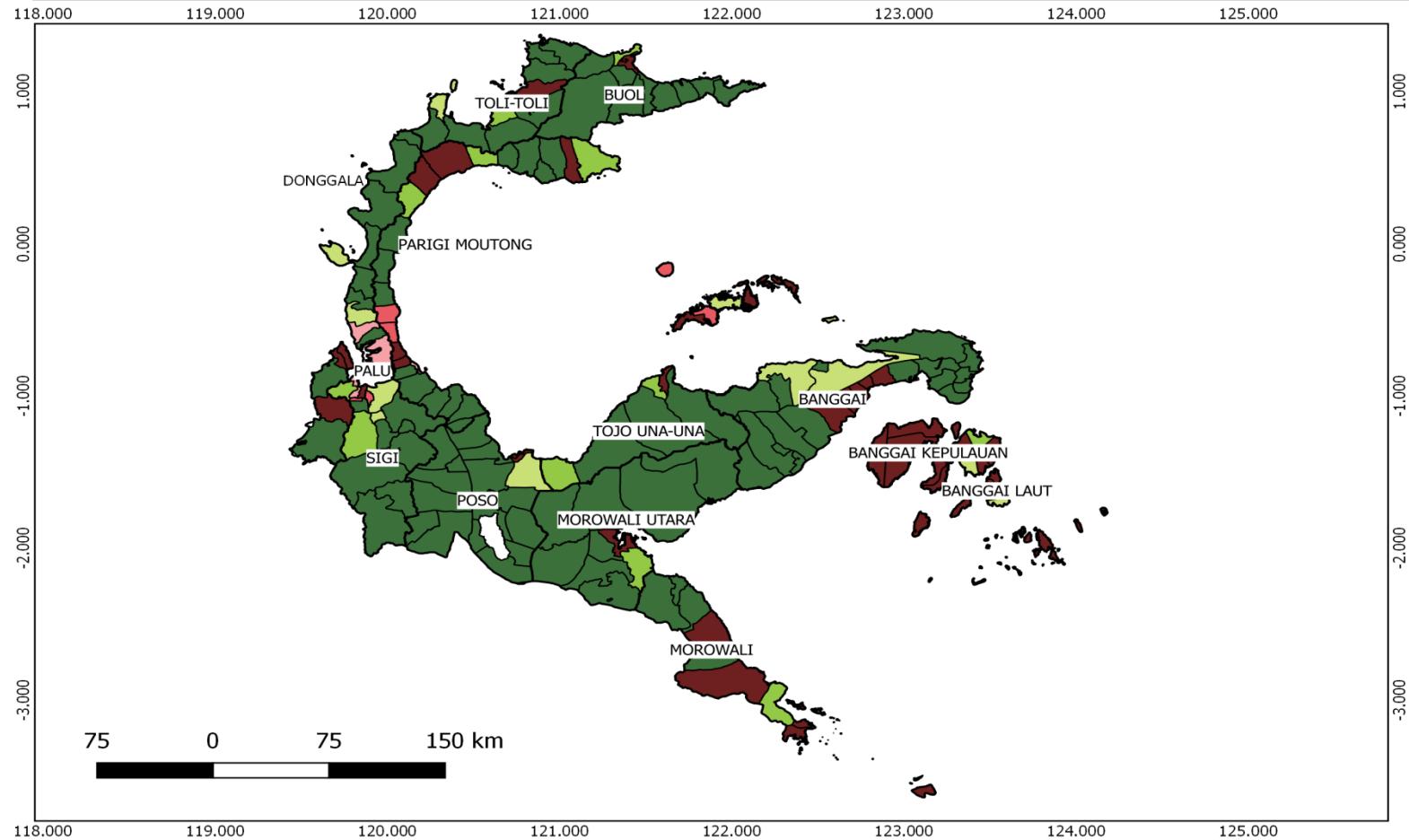
- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Pemanfaatan lahan pertanian dan pekarangan secara optimal.
- f. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, puskesmas), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- g. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- h. Penyediaan tenaga kesehatan.

# **LAMPIRAN**

## Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih serealia



# PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN ( Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA ) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020



### LEGENDA

- Peta Sulteng NCPR
- Prioritas 1
- Prioritas 2
- Prioritas 3
- Prioritas 4
- Prioritas 5
- Prioritas 6

Sumber Data :  
1. Dinas TPH, 2019

**Kecamatan Prioritas 1, 2 dan 3 indikator Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih serealia**

Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	1. P. NCPR
BANGGAI	7202	7202040	KINTOM	1
BANGGAI	7202	7202050	LUWUK	1
BANGGAI	7202	7202052	LUWUK UTARA	1
BANGGAI	7202	7202053	LUWUK SELATAN	1
BANGGAI	7202	7202054	NAMBO	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208023	PARIGI UTARA	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208024	PARIGI TENGAH	1
MOROWALI UTARA	7212	7212050	PETASIA	1

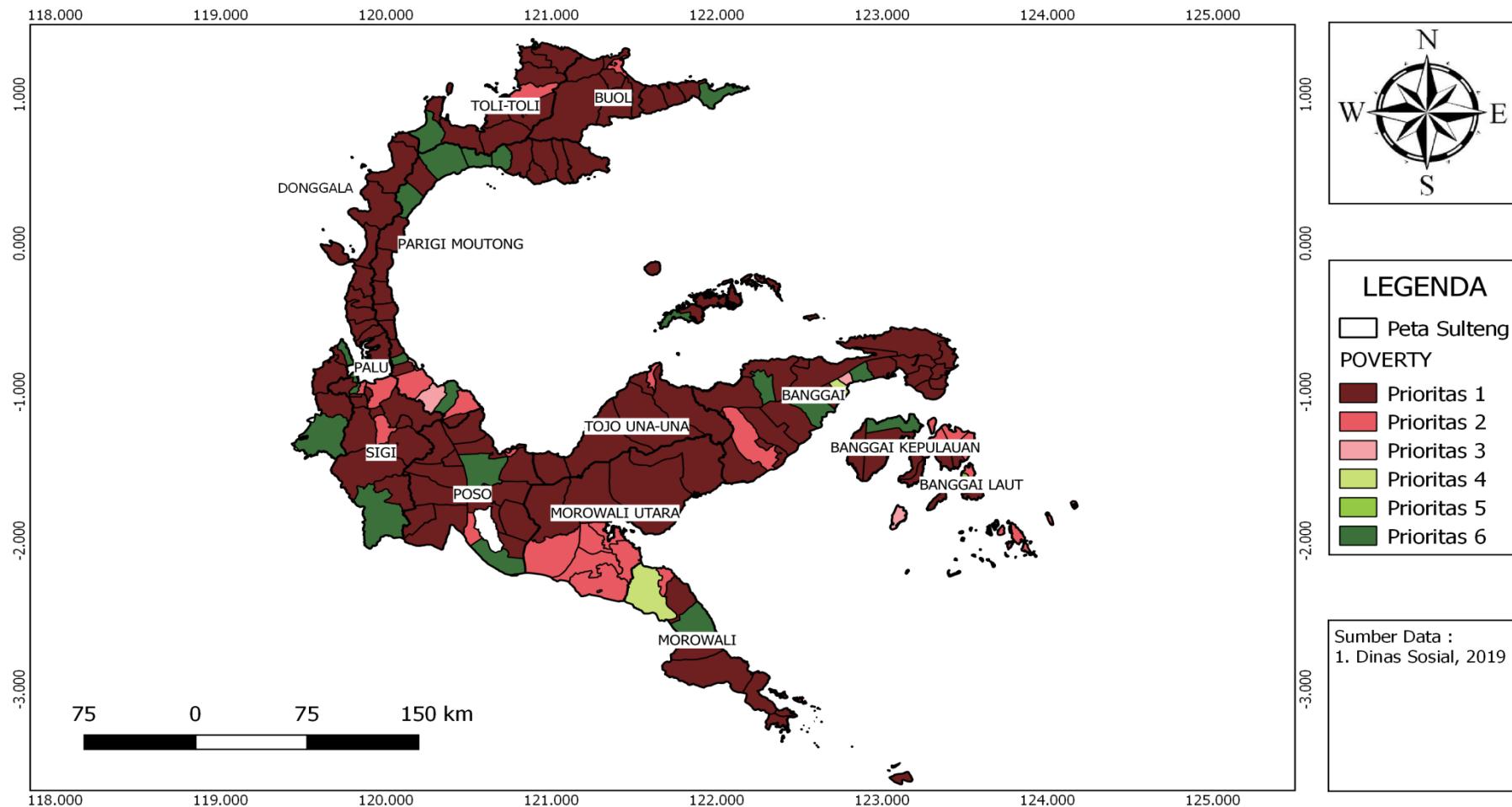
Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	1. P. NCPR
BANGGAI	7202	7202082	BALANTAK UTARA	2
PARIGI MOUTONG	7208	7208030	AMPIBABO	2
PARIGI MOUTONG	7208	7208062	TAOPA	2

Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	1. P. NCPR
POSO	7204	7204070	POSO KOTA	3
POSO	7204	7204071	POSO KOTA UTARA	3
PARIGI MOUTONG	7208	7208040	TINOMBO	3
PARIGI MOUTONG	7208	7208052	PALASA	3

## Presentase Penduduk yang Hidup Dibawah Garis Kemiskinan



# PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN ( Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA ) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020



## Kecamatan Prioritas 1,2 dan 3 indikator Presentase Penduduk yang Hidup Dibawah Garis Kemiskinan

Nama KAB_KOTA	Nama KEC	2. P. POVERTY
TOLI-TOLI	DAMPAL UTARA	1
TOLI-TOLI	DONDO	1
TOLI-TOLI	OGODEIDE	1
TOLI-TOLI	BASIDONDO	1
TOLI-TOLI	LAMPASIO	1
TOLI-TOLI	GALANG	1
TOLI-TOLI	TOLITOLI UTARA	1
TOLI-TOLI	DAKO PAMEAN	1
BUOL	LAKEA	1
BUOL	KARAMAT	1
BUOL	MOMUNU	1
BUOL	TILOAN	1
BUOL	BOKAT	1
BUOL	BUKAL	1
BUOL	BUNOBOGU	1
BUOL	GADUNG	1
BUOL	PALELEH BARAT	1
PARIGI MOUTONG	PARIGI BARAT	1
PARIGI MOUTONG	PARIGI UTARA	1
PARIGI MOUTONG	AMPIBABO	1
PARIGI MOUTONG	KASIMBAR	1
PARIGI MOUTONG	TORIBULU	1
PARIGI MOUTONG	SINIU	1
PARIGI MOUTONG	TINOMBO	1
PARIGI MOUTONG	TINOMBO SELATAN	1
PARIGI MOUTONG	MOUTONG	1
PARIGI MOUTONG	BOLANO LAMBUNU	1
PARIGI MOUTONG	TAOPA	1
PARIGI MOUTONG	BOLANO	1
PARIGI MOUTONG	ONGKA MALINO	1
TOJO UNA-UNA	TOJO BARAT	1
TOJO UNA-UNA	TOJO	1
TOJO UNA-UNA	ULUBONGKA	1
TOJO UNA-UNA	AMPANA TETE	1
TOJO UNA-UNA	AMPANA KOTA	1
TOJO UNA-UNA	UNA - UNA	1
TOJO UNA-UNA	TOGEAN	1
TOJO UNA-UNA	WALEA KEPULAUAN	1
TOJO UNA-UNA	WALEA BESAR	1
TOJO UNA-UNA	TALATAKO	1
SIGI	KULAWI SELATAN	1
SIGI	KULAWI	1
SIGI	LINDU	1
SIGI	NOKILALAKI	1
SIGI	PALOLO	1
SIGI	DOLO SELATAN	1
SIGI	DOLO BARAT	1
SIGI	TANAMBULAVA	1
SIGI	DOLO	1
SIGI	MARAWOLA BARAT	1
BANGGAI LAUT	LABOBO	1
BANGGAI LAUT	BANGGAI SELATAN	1
MOROWALI UTARA	MORI UTARA	1
MOROWALI UTARA	SOYO JAYA	1
MOROWALI UTARA	BUNGKU UTARA	1
MOROWALI UTARA	MAMOSALATO	1

DONGGALA	7205	7205161	SOJOL UTARA	1
TOLI-TOLI	7206	7206010	DAMPAL SELATAN	1
TOLI-TOLI	7206	7206020	DAMPAL UTARA	1
TOLI-TOLI	7206	7206030	DONDO	1
TOLI-TOLI	7206	7206031	OGODEIDE	1
TOLI-TOLI	7206	7206032	BASIDONDO	1
TOLI-TOLI	7206	7206041	LAMPASIO	1
TOLI-TOLI	7206	7206050	GALANG	1
TOLI-TOLI	7206	7206060	TOLITOLI UTARA	1
TOLI-TOLI	7206	7206061	DAKO PAMEAN	1
BUOL	7207	7207010	LAKEA	1
BUOL	7207	7207011	BIAU	1
BUOL	7207	7207012	KARAMAT	1
BUOL	7207	7207020	MOMUNU	1
BUOL	7207	7207021	TILOAN	1
BUOL	7207	7207030	BOKAT	1
BUOL	7207	7207031	BUKAL	1
BUOL	7207	7207040	BUNOBOGU	1
BUOL	7207	7207041	GADUNG	1
BUOL	7207	7207050	PALELEH	1
BUOL	7207	7207051	PALELEH BARAT	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208010	SAUSU	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208022	PARIGI BARAT	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208023	PARIGI UTARA	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208024	PARIGI TENGAH	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208030	AMPIBABO	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208031	KASIMBAR	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208032	TORIBULU	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208033	SINIU	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208040	TINOMBO	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208041	TINOMBO SELATAN	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208042	SIDOAN	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208050	TOMINI	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208051	MEPANGA	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208052	PALASA	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208060	MOUTONG	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208061	BOLANO LAMBUNU	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208062	TAOPA	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208063	BOLANO	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208064	ONGKA MALINO	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209030	ULUBONGKA	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209040	AMPANA TETE	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209060	UNA-UNA	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209061	BATUDAKA	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209070	TOGEAN	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209080	WALEA KEPULAUAN	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209081	WALEA BESAR	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209082	TALATAKO	1
SIGI	7210	7210010	PIPIKORO	1
SIGI	7210	7210020	KULAWI SELATAN	1
SIGI	7210	7210030	KULAWI	1
SIGI	7210	7210040	LINDU	1
SIGI	7210	7210050	NOKILALAKI	1
SIGI	7210	7210060	PALOLO	1
SIGI	7210	7210080	DOLO SELATAN	1
SIGI	7210	7210100	TANAMBULAVA	1
SIGI	7210	7210110	DOLO	1
SIGI	7210	7210140	MARAWOLA BARAT	1
SIGI	7210	7210150	KINOVARO	1
BANGGAI LAUT	7211	7211020	LABOBO	1
MOROWALI UTARA	7212	7212090	BUNGKU UTARA	1
MOROWALI UTARA	7212	7212100	MAMOSALATO	1
PALU	7271	7271040	PALU UTARA	1
PALU	7271	7271041	TAWAELI	1

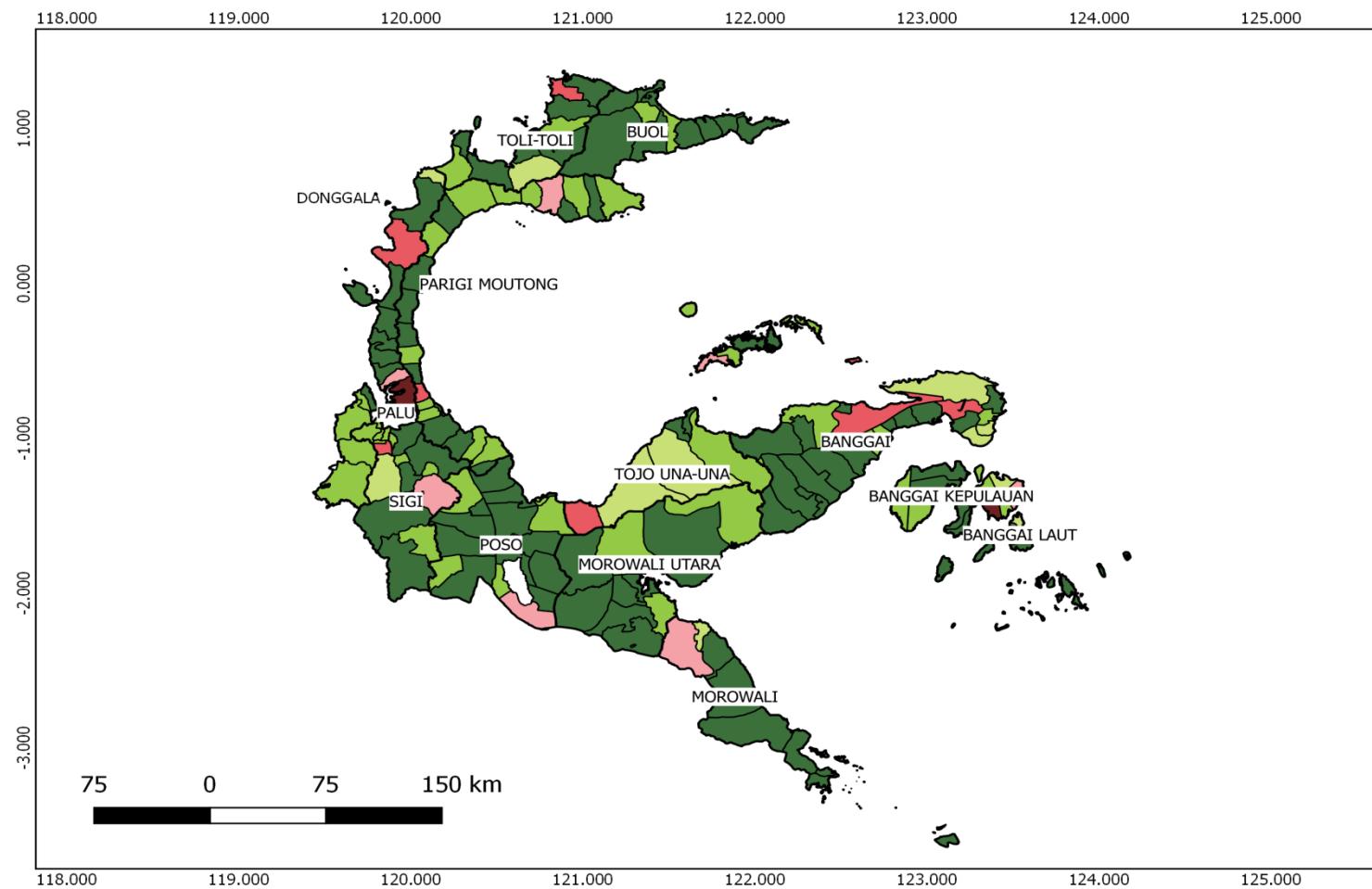
Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	2. P. POVERTY
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201031	TOTIKUM SELATAN	2
BANGGAI	7202	7202010	TOILI	2
BANGGAI	7202	7202032	SIMPANG RAYA	2
BANGGAI	7202	7202050	LUWUK	2
BANGGAI	7202	7202052	LUWUK UTARA	2
MOROWALI	7203	7203022	BUNGKU PESISIR	2
MOROWALI	7203	7203031	BUNGKU TIMUR	2
POSO	7204	7204070	POSO KOTA	2
POSO	7204	7204071	POSO KOTA UTARA	2
POSO	7204	7204072	POSO KOTA SELATAN	2
TOLI-TOLI	7206	7206040	BAOLAN	2
PARIGI MOUTONG	7208	7208011	TORUE	2
PARIGI MOUTONG	7208	7208012	BALINGGI	2
PARIGI MOUTONG	7208	7208020	PARIGI	2
PARIGI MOUTONG	7208	7208021	PARIGI SELATAN	2
TOJO UNA-UNA	7209	7209010	TOJO BARAT	2
TOJO UNA-UNA	7209	7209020	TOJO	2
TOJO UNA-UNA	7209	7209050	AMPANA KOTA	2
SIGI	7210	7210070	GUMBASA	2
SIGI	7210	7210120	SIGI BIROMARU	2
SIGI	7210	7210130	MARAWOLA	2
BANGGAI LAUT	7211	7211010	BANGKURUNG	2
BANGGAI LAUT	7211	7211030	BANGGAI UTARA	2
BANGGAI LAUT	7211	7211050	BANGGAI TENGAH	2
BANGGAI LAUT	7211	7211060	BANGGAI SELATAN	2
BANGGAI LAUT	7211	7211070	BOKAN KEPULAUAN	2
MOROWALI UTARA	7212	7212010	MORI ATAS	2
MOROWALI UTARA	7212	7212020	LEMBO	2
MOROWALI UTARA	7212	7212040	PETASIA TIMUR	2
MOROWALI UTARA	7212	7212060	PETASIA BARAT	2
MOROWALI UTARA	7212	7212070	MORI UTARA	2
MOROWALI UTARA	7212	7212080	SOYO JAYA	2
PALU	7271	7271012	ULUJADI	2

Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	2. P. POVERTY
MOROWALI	7203	7203030	BUNGKU TENGAH	3
TOJO UNA-UNA	7209	7209051	RATOLINDO	3
MOROWALI UTARA	7212	7212030	LEMBO RAYA	3
MOROWALI UTARA	7212	7212050	PETASIA	3

## Presentase RT dengan Proporsi Pengeluaran Rumah Tangga untuk Pangan >65% Terhadap Total Pengeluaran



### PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN ( Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA ) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

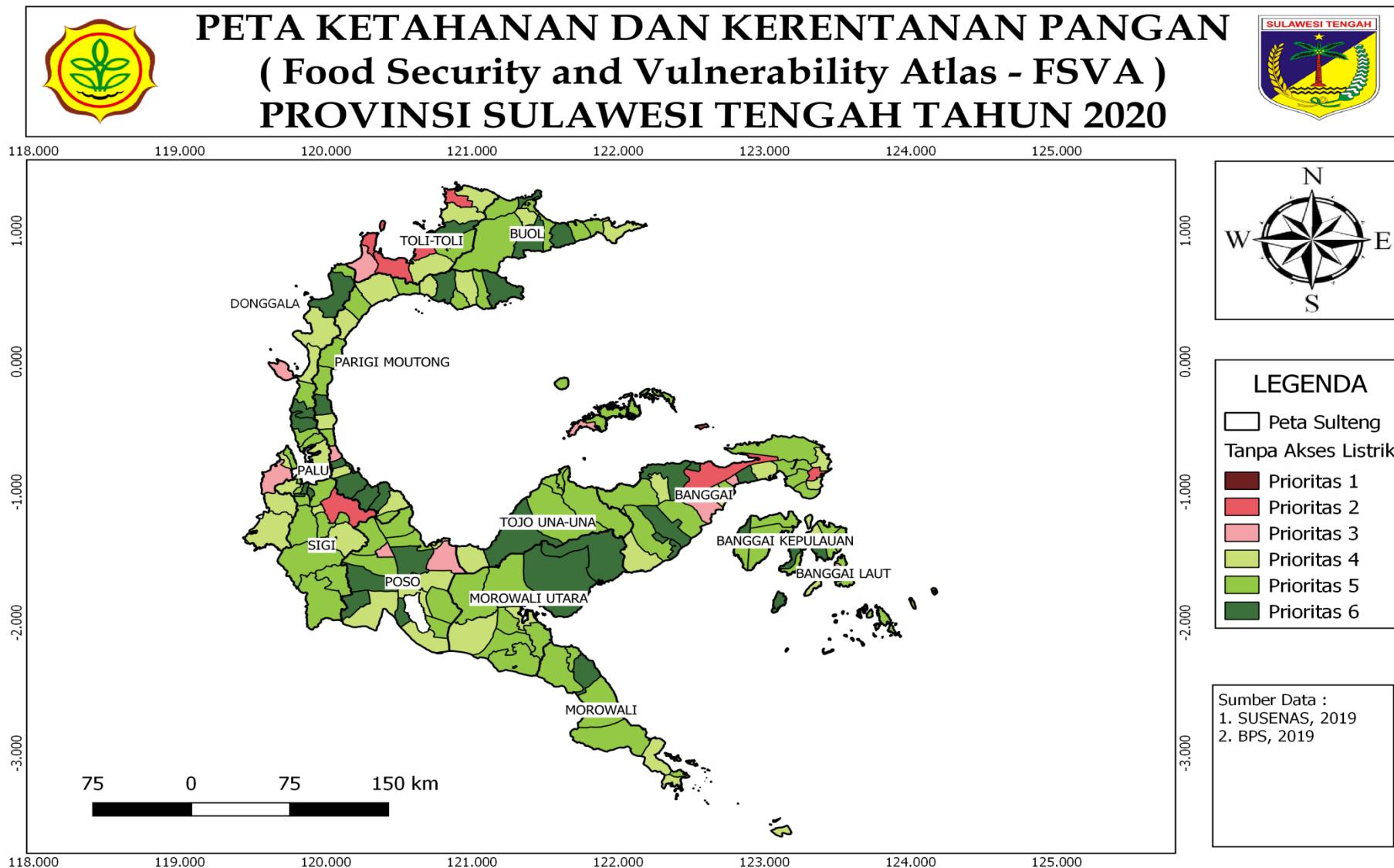


**Kecamatan Prioritas 2 dan 3 Presentase Rumah Tangga dengan Proporsi Pengeluaran RT untuk Pangan  
>65% Terhadap Total Pengeluaran**

Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	3. P. FOOD EX
TOJO UNA-UNA	7209	7209082	TALATAKO	2
SIGI	7210	7210140	MARAWOLA BARAT	2
SIGI	7210	7210150	KINOVARO	2

Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	3. P. FOOD EX
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201031	TOTIKUM SELATAN	3
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201061	BULAGI SELATAN	3
POSO	7204	7204021	LORE BARAT	3
DONGGALA	7205	7205120	SIRENJA	3
DONGGALA	7205	7205130	BALAESANG	3
BUOL	7207	7207040	BUNOBOGU	3
PARIGI MOUTONG	7208	7208023	PARIGI UTARA	3
PARIGI MOUTONG	7208	7208040	TINOMBO	3
PARIGI MOUTONG	7208	7208050	TOMINI	3
TOJO UNA-UNA	7209	7209020	TOJO	3
TOJO UNA-UNA	7209	7209061	BATUDAKA	3
TOJO UNA-UNA	7209	7209081	WALEA BESAR	3
SIGI	7210	7210020	KULAWI SELATAN	3
SIGI	7210	7210040	LINDU	3
SIGI	7210	7210080	DOLO SELATAN	3
BANGGAI LAUT	7211	7211070	BOKAN KEPULAUAN	3
MOROWALI UTARA	7212	7212060	PETASIA BARAT	3

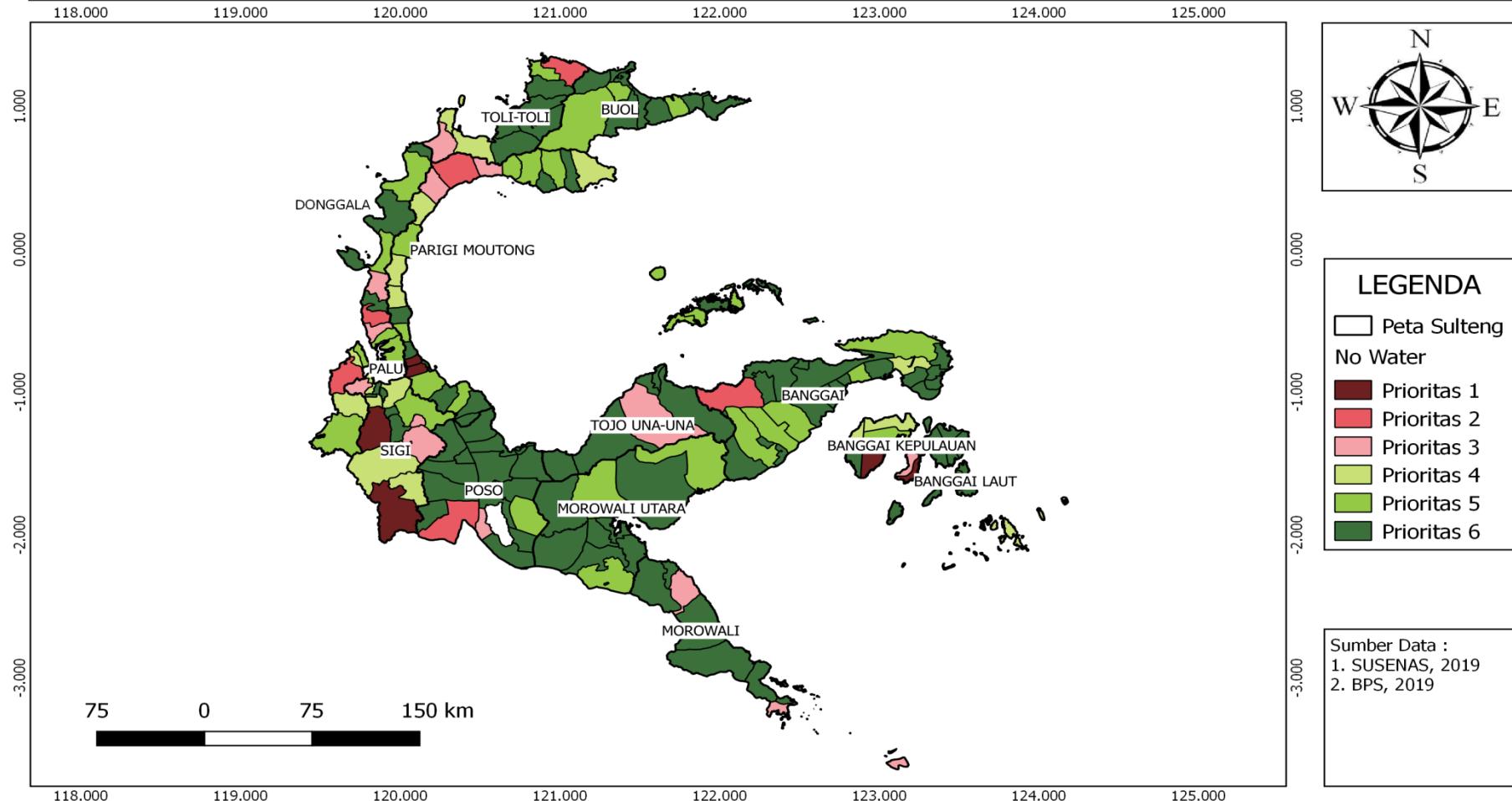
## Presentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik



## Presentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih



# PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN ( Food security and Vulnerability Atlas - FSVA ) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020



## Kecamatan Prioritas 1,2 dan 3 Presentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih

Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	5. P. NoWATER
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201030	TOTIKUM	1
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201041	TINANGKUNG SELATAN	1
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201060	BULAGI	1
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201071	BUKO SELATAN	1
BANGGAI	7202	7202060	PAGIMANA	1
BANGGAI	7202	7202072	MANTOH	1
POSO	7204	7204010	PAMONA SELATAN	1
POSO	7204	7204012	PAMONA TENGGARA	1
POSO	7204	7204031	PAMONA TIMUR	1
POSO	7204	7204032	PAMONA UTARA	1
POSO	7204	7204040	LORE UTARA	1
POSO	7204	7204041	LORE TENGAH	1
POSO	7204	7204043	LORE PEORE	1
POSO	7204	7204051	POSO PESISIR SELATAN	1
TOLI-TOLI	7206	7206041	LAMPASIO	1
BUOL	7207	7207012	KARAMAT	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208032	TORIBULU	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208063	BOLANO	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209010	TOJO BARAT	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209030	ULUBONGKA	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209061	BATUDAKA	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209070	TOGEAN	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209080	WALEA KEPULAUAN	1
SIGI	7210	7210020	KULAWI SELATAN	1
SIGI	7210	7210040	LINDU	1
SIGI	7210	7210100	TANAMBULAVA	1
SIGI	7210	7210140	MARAWOLA BARAT	1
SIGI	7210	7210150	KINOVARO	1
BANGGAI LAUT	7211	7211030	BANGGAI UTARA	1
MOROWALI UTARA	7212	7212010	MORI ATAS	1

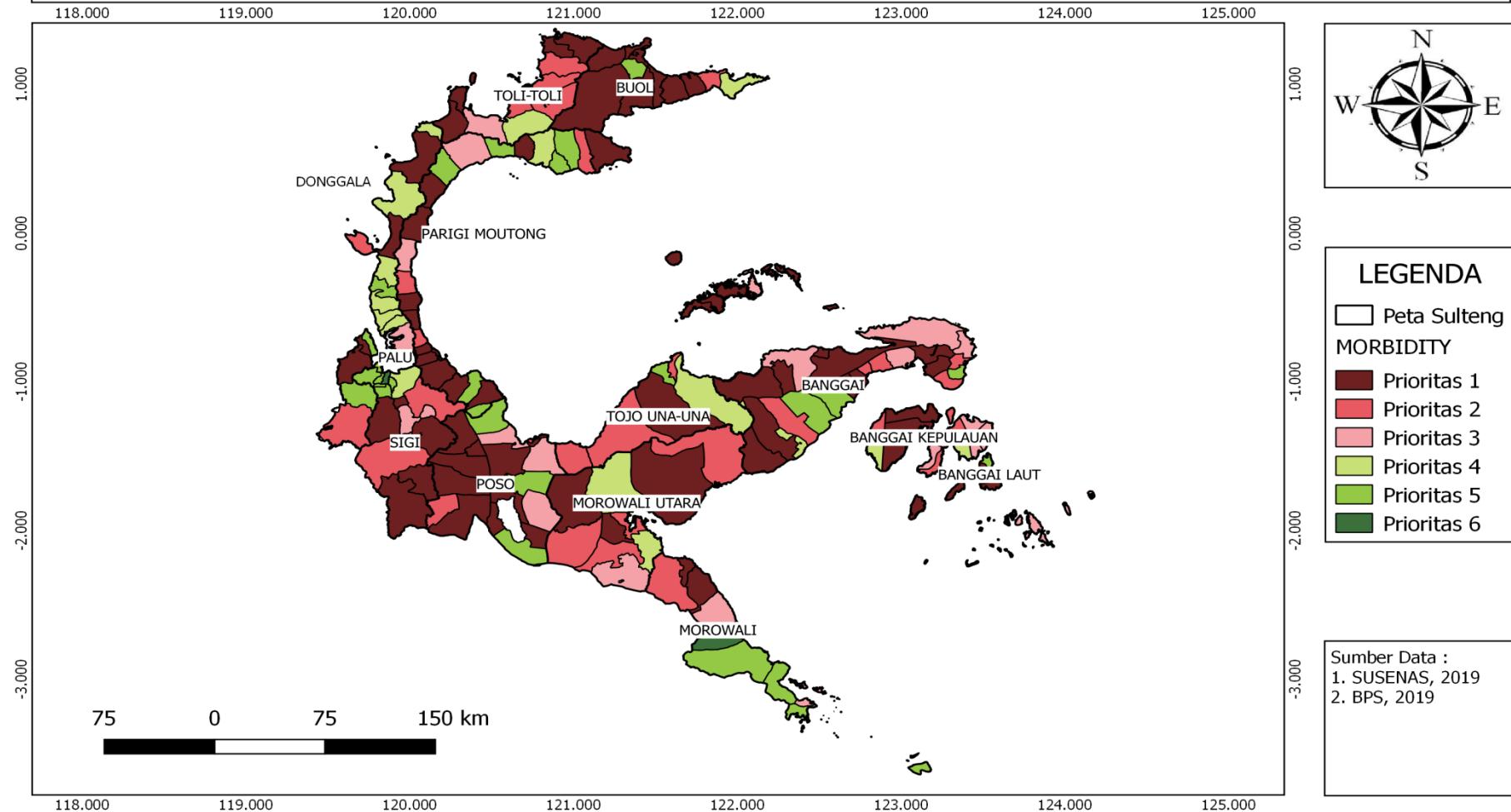
Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	5. P. NoWATER
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201031	TOTIKUM SELATAN	2
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201050	LIANG	2
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201062	BULAGI UTARA	2
BANGGAI	7202	7202051	LUWUK TIMUR	2
MOROWALI	7203	7203022	BUNGKU PESISIR	2
POSO	7204	7204042	LORE TIMUR	2
TOJO UNA-UNA	7209	7209020	TOJO	2
TOJO UNA-UNA	7209	7209040	AMPANA TETE	2
TOJO UNA-UNA	7209	7209050	AMPANA KOTA	2
TOJO UNA-UNA	7209	7209060	UNA-UNA	2
BANGGAI LAUT	7211	7211020	LABOBO	2
BANGGAI LAUT	7211	7211050	BANGGAI TENGAH	2
MOROWALI UTARA	7212	7212060	PETASIA BARAT	2
MOROWALI UTARA	7212	7212080	SOYO JAYA	2

Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	5. P. NoWATER
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201051	PELING TENGAH	3
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201061	BULAGI SELATAN	3
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201070	BUKO	3
BANGGAI	7202	7202021	BATUI SELATAN	3
BANGGAI	7202	7202040	KINTOM	3
BANGGAI	7202	7202061	BUALEMO	3
BANGGAI	7202	7202062	LOBU	3
BANGGAI	7202	7202082	BALANTAK UTARA	3
MOROWALI	7203	7203010	MENUI KEPULAUAN	3
MOROWALI	7203	7203020	BUNGKU SELATAN	3
POSO	7204	7204021	LORE BARAT	3
POSO	7204	7204030	PAMONA PUSALEMBA	3
POSO	7204	7204060	LAGE	3
DONGGALA	7205	7205120	SIRENJA	3
DONGGALA	7205	7205130	BALAESANG	3
DONGGALA	7205	7205131	BALAESANG TANJUNG	3
DONGGALA	7205	7205140	DAMPELAS	3
TOLI-TOLI	7206	7206032	BASIDONDO	3
BUOL	7207	7207021	TILOAN	3
BUOL	7207	7207051	PALELEH BARAT	3
TOJO UNA-UNA	7209	7209051	RATOLINDO	3
SIGI	7210	7210010	PIPIKORO	3
SIGI	7210	7210050	NOKILALAKI	3
BANGGAI LAUT	7211	7211010	BANGKURUNG	3

## Presentase Angka Kesakitan



# PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN ( Food security and Vulnerability Atlas - FSVA ) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020



## Kecamatan Prioritas 1,2 dan 3 Presentase Angka Kesakitan

Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	6. P. MOBIRDITY
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201040	TINANGKUNG	1
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201042	TINANGKUNG UTARA	1
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201062	BULAGI UTARA	1
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201071	BUKO SELATAN	1
BANGGAI	7202	7202010	TOILI	1
BANGGAI	7202	7202011	TOILI BARAT	1
BANGGAI	7202	7202012	MOILONG	1
BANGGAI	7202	7202021	BATUI SELATAN	1
BANGGAI	7202	7202032	SIMPANG RAYA	1
BANGGAI	7202	7202040	KINTOM	1
BANGGAI	7202	7202052	LUWUK UTARA	1
BANGGAI	7202	7202053	LUWUK SELATAN	1
BANGGAI	7202	7202054	NAMBO	1
BANGGAI	7202	7202061	BUALEMO	1
BANGGAI	7202	7202072	MANTOH	1
BANGGAI	7202	7202082	BALANTAK UTARA	1
MOROWALI	7203	7203021	BAHODOPI	1
MOROWALI	7203	7203031	BUNGKU TIMUR	1
POSO	7204	7204031	PAMONA TIMUR	1
POSO	7204	7204040	LORE UTARA	1
POSO	7204	7204043	LORE PEORE	1
POSO	7204	7204050	POSO PESISIR	1
POSO	7204	7204051	POSO PESISIR SELATAN	1
POSO	7204	7204052	POSO PESISIR UTARA	1
POSO	7204	7204070	POSO KOTA	1
DONGGALA	7205	7205080	BANAWA	1
DONGGALA	7205	7205081	BANAWA SELATAN	1
DONGGALA	7205	7205090	LABUAN	1
DONGGALA	7205	7205100	SINDUE	1
DONGGALA	7205	7205101	SINDUE TOMBUSABORA	1
DONGGALA	7205	7205102	SINDUE TOBATA	1
DONGGALA	7205	7205120	SIRENJA	1
DONGGALA	7205	7205160	SOJOL	1

TOLI-TOLI	7206	7206020	DAMPAL UTARA	1
TOLI-TOLI	7206	7206032	BASIDONDO	1
TOLI-TOLI	7206	7206041	LAMPASIO	1
TOLI-TOLI	7206	7206050	GALANG	1
TOLI-TOLI	7206	7206060	TOLITOLI UTARA	1
BUOL	7207	7207012	KARAMAT	1
BUOL	7207	7207021	TILOAN	1
BUOL	7207	7207030	BOKAT	1
BUOL	7207	7207041	GADUNG	1
BUOL	7207	7207050	PALELEH	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208010	SAUSU	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208011	TORUE	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208012	BALINGGI	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208021	PARIGI SELATAN	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208031	KASIMBAR	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208041	TINOMBO SELATAN	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208042	SIDOAN	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208061	BOLANO LAMBUNU	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209030	ULUBONGKA	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209060	UNA-UNA	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209061	BATUDAKA	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209070	TOGEAN	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209081	WALEA BESAR	1
SIGI	7210	7210030	KULAWI	1
SIGI	7210	7210060	PALOLO	1
SIGI	7210	7210080	DOLO SELATAN	1
SIGI	7210	7210090	DOLO BARAT	1
SIGI	7210	7210100	TANAMBULAVA	1
SIGI	7210	7210120	SIGI BIROMARU	1
SIGI	7210	7210140	MARAWOLA BARAT	1
SIGI	7210	7210150	KINOVARO	1
BANGGAI LAUT	7211	7211020	LABOBO	1
BANGGAI LAUT	7211	7211030	BANGGAI UTARA	1
MOROWALI UTARA	7212	7212040	PETASIA TIMUR	1
MOROWALI UTARA	7212	7212050	PETASIA	1
MOROWALI UTARA	7212	7212060	PETASIA BARAT	1
MOROWALI UTARA	7212	7212090	BUNGKU UTARA	1
MOROWALI UTARA	7212	7212100	MAMOSALATO	1
PALU	7271	7271010	PALU BARAT	1
PALU	7271	7271011	TATANGA	1
PALU	7271	7271012	ULUJADI	1
PALU	7271	7271020	PALU SELATAN	1
PALU	7271	7271031	MANTIKULORE	1
PALU	7271	7271040	PALU UTARA	1
PALU	7271	7271041	TAWAELI	1

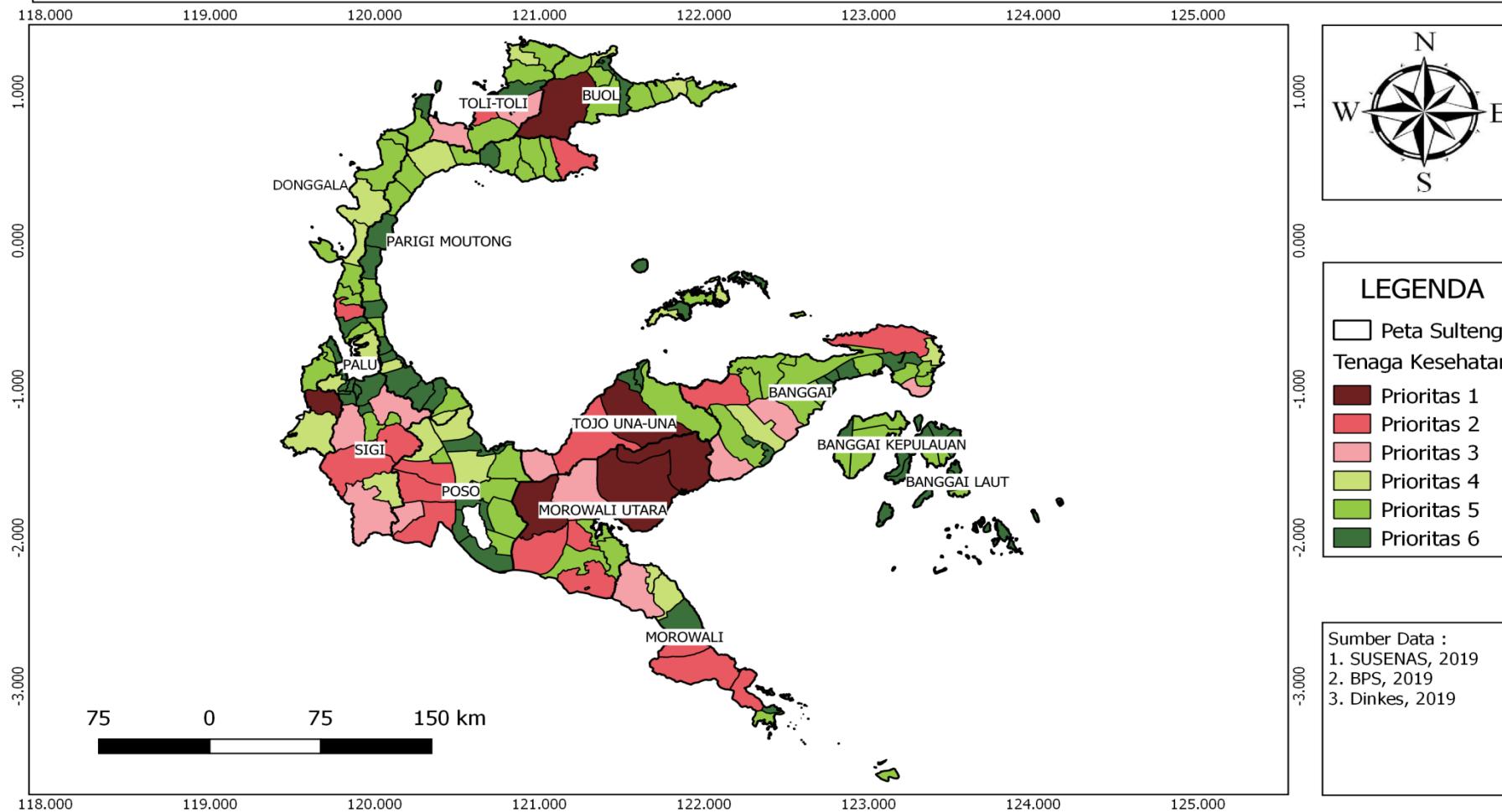
Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	6. P. MOBIRDITY
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201030	TOTIKUM	2
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201061	BULAGI SELATAN	2
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201070	BUKO	2
BANGGAI	7202	7202020	BATUI	2
BANGGAI	7202	7202030	BUNTA	2
BANGGAI	7202	7202062	LOBU	2
BANGGAI	7202	7202071	MASAMA	2
MOROWALI	7203	7203030	BUNGKU TENGAH	2
MOROWALI	7203	7203040	BUNGKU BARAT	2
MOROWALI	7203	7203041	BUMI RAYA	2
POSO	7204	7204020	LORE SELATAN	2
POSO	7204	7204021	LORE BARAT	2
POSO	7204	7204030	PAMONA PUSALEMBA	2
POSO	7204	7204071	POSO KOTA UTARA	2
POSO	7204	7204072	POSO KOTA SELATAN	2
DONGGALA	7205	7205051	PINEMBANI	2
DONGGALA	7205	7205091	TANANTOVEA	2
DONGGALA	7205	7205131	BALAESANG TANJUNG	2
DONGGALA	7205	7205161	SOJOL UTARA	2
TOLI-TOLI	7206	7206030	DONDO	2
BUOL	7207	7207010	LAKEA	2
BUOL	7207	7207020	MOMUNU	2
BUOL	7207	7207040	BUNOBOGU	2
PARIGI MOUTONG	7208	7208020	PARIGI	2
PARIGI MOUTONG	7208	7208030	AMPIBABO	2
PARIGI MOUTONG	7208	7208033	SINIU	2
PARIGI MOUTONG	7208	7208040	TINOMBO	2
PARIGI MOUTONG	7208	7208052	PALASA	2
PARIGI MOUTONG	7208	7208060	MOUTONG	2
PARIGI MOUTONG	7208	7208062	TAOPA	2
TOJO UNA-UNA	7209	7209020	TOJO	2
TOJO UNA-UNA	7209	7209050	AMPANA KOTA	2
TOJO UNA-UNA	7209	7209082	TALATAKO	2
SIGI	7210	7210010	PIPIKORO	2
SIGI	7210	7210020	KULAWI SELATAN	2
SIGI	7210	7210110	DOLO	2
SIGI	7210	7210130	MARAWOLA	2
BANGGAI LAUT	7211	7211010	BANGKURUNG	2
BANGGAI LAUT	7211	7211050	BANGGAI TENGAH	2
MOROWALI UTARA	7212	7212030	LEMBO RAYA	2
MOROWALI UTARA	7212	7212070	MORI UTARA	2

Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	6. P. MOBIRDITY
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201031	TOTIKUM SELATAN	3
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201050	LIANG	3
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201060	BULAGI	3
BANGGAI	7202	7202050	LUWUK	3
BANGGAI	7202	7202060	PAGIMANA	3
MOROWALI	7203	7203042	WITA PONDA	3
POSO	7204	7204011	PAMONA BARAT	3
POSO	7204	7204012	PAMONA TENGGARA	3
POSO	7204	7204041	LORE TENGAH	3
POSO	7204	7204060	LAGE	3
DONGGALA	7205	7205041	RIO PAKAVA	3
TOLI-TOLI	7206	7206040	BAOLAN	3
TOLI-TOLI	7206	7206061	DAKO PAMEAN	3
BUOL	7207	7207011	BIAU	3
PARIGI MOUTONG	7208	7208024	PARIGI TENGAH	3
PARIGI MOUTONG	7208	7208032	TORIBULU	3
TOJO UNA-UNA	7209	7209040	AMPANA TETE	3
TOJO UNA-UNA	7209	7209080	WALEA KEPULAUAN	3
BANGGAI LAUT	7211	7211040	BANGGAI	3
MOROWALI UTARA	7212	7212010	MORI ATAS	3
MOROWALI UTARA	7212	7212020	LEMBO	3

## Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Tingkat Kepadatan



# PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN ( Food security and Vulnerability Atlas - FSVA ) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020



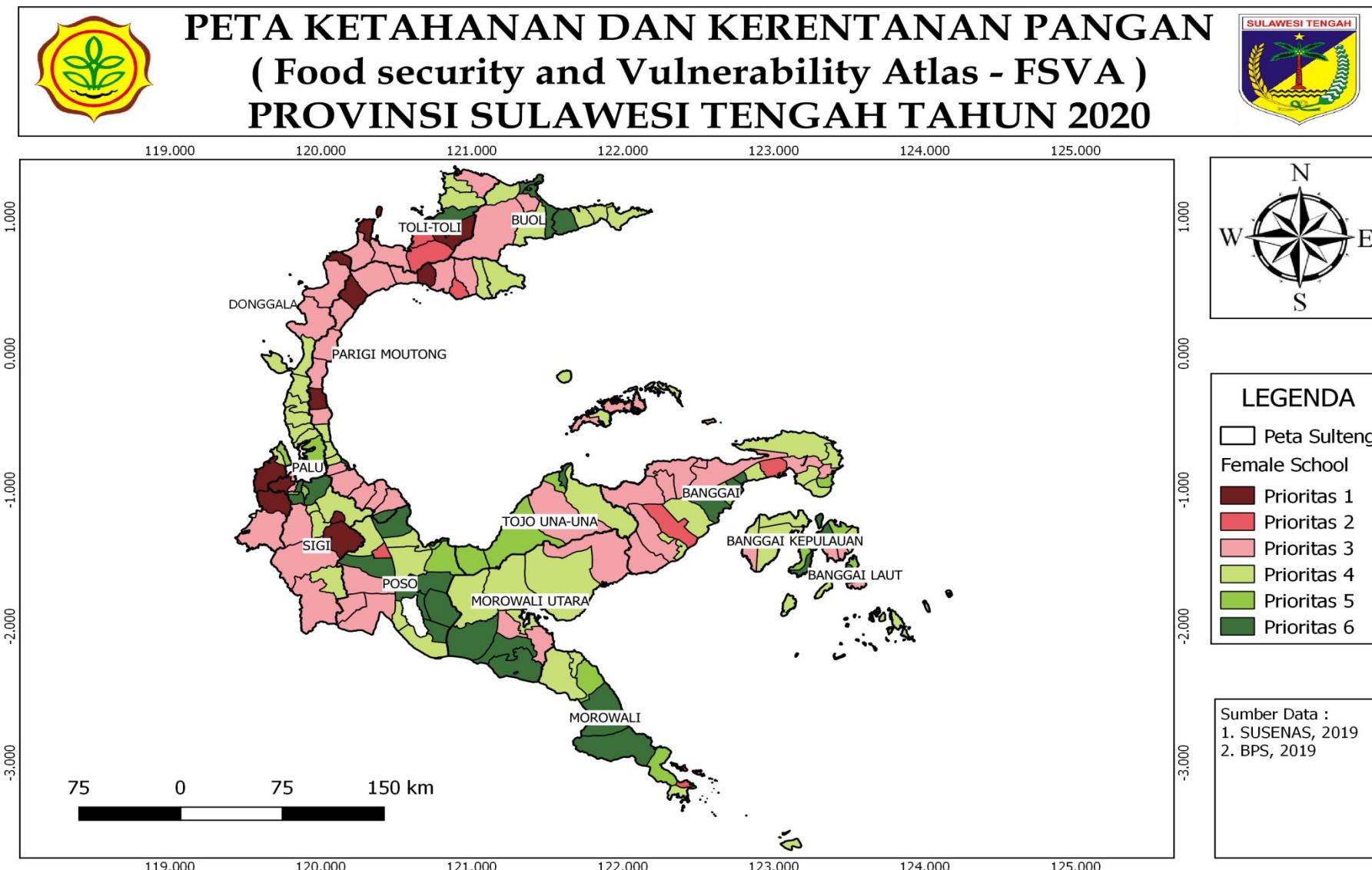
**Kecamatan Prioritas 1,2 dan 3 Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Tingkat Kepadatan**

Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	7. P. TENKES
PARIGI MOUTONG	7208	7208024	PARIGI TENGAH	1
PARIGI MOUTONG	7208	7208062	TAOPA	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209051	RATOLINDO	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209061	BATUDAKA	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209082	TALATAKO	1

Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	7. P. TENKES
DONGGALA	7205	7205051	PINEMBANI	2
BUOL	7207	7207021	TILOAN	2
TOJO UNA-UNA	7209	7209030	ULUBONGKA	2
MOROWALI UTARA	7212	7212090	BUNGKU UTARA	2

Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	7. P. TENKES
POSO	7204	7204043	LORE PEORE	3
SIGI	7210	7210010	PIPIKORO	3
MOROWALI UTARA	7212	7212070	MORI UTARA	3

## Rata2 Lama Sekolah Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas



**Kecamatan Prioritas 1,2 dan 3 Rata2 Lama Sekolah Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas**

Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	8. P. FSCHOOL
PARIGI MOUTONG	7208	7208052	PALASA	1
SIGI	7210	7210140	MARAWOLA BARAT	1

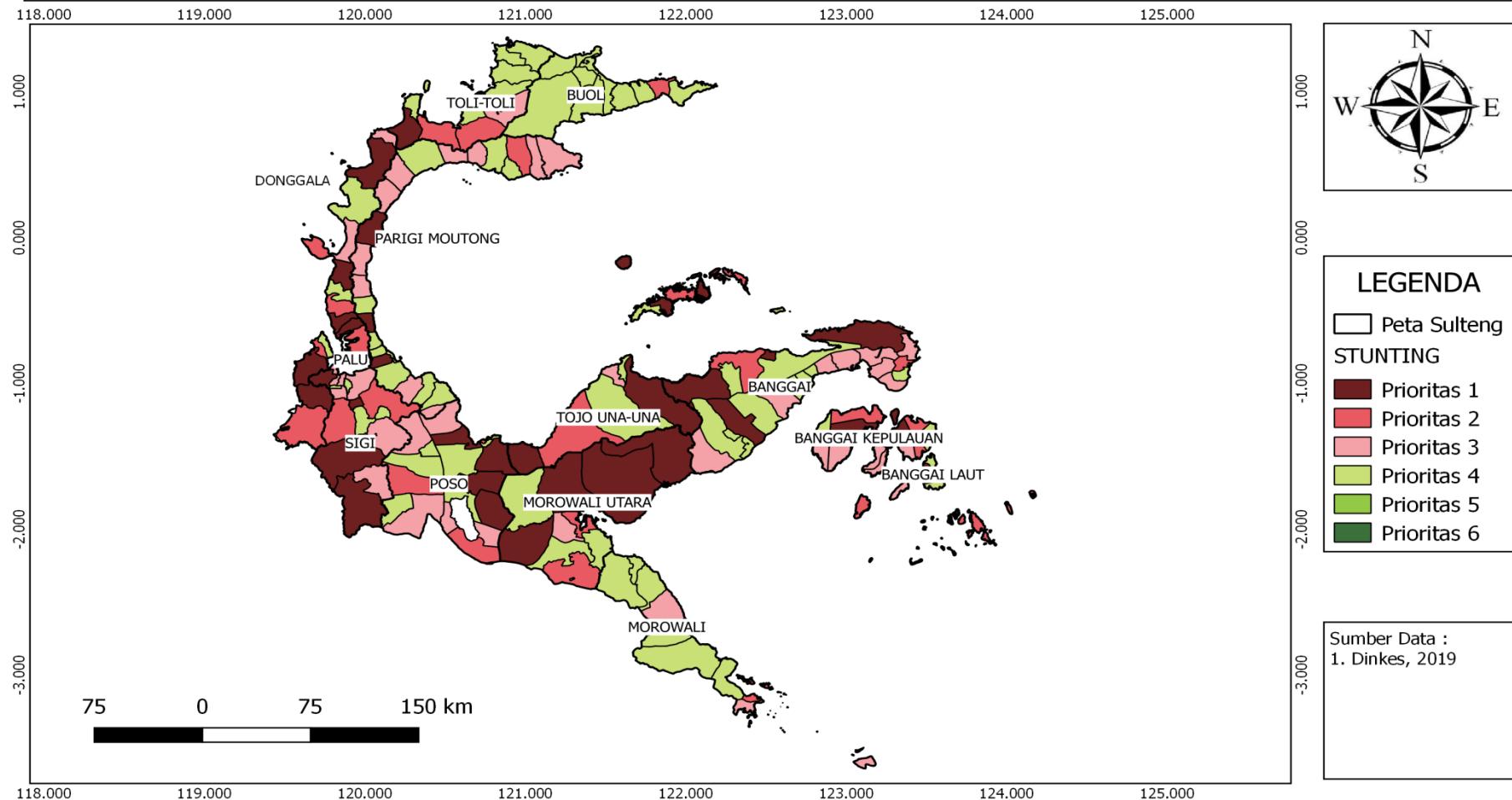
Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	8. P. FSCHOOL
DONGGALA	7205	7205051	PINEMBANI	2
PARIGI MOUTONG	7208	7208040	TINOMBO	2
PARIGI MOUTONG	7208	7208050	TOMINI	2
TOJO UNA-UNA	7209	7209081	WALEA BESAR	2
MOROWALI UTARA	7212	7212060	PETASIA BARAT	2

Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	8. P. FSCHOOL
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201031	TOTIKUM SELATAN	3
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201042	TINANGKUNG UTARA	3
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201061	BULAGI SELATAN	3
BANGGAI	7202	7202010	TOILI	3
BANGGAI	7202	7202011	TOILI BARAT	3
BANGGAI	7202	7202021	BATUI SELATAN	3
BANGGAI	7202	7202031	NUHON	3
BANGGAI	7202	7202032	SIMPANG RAYA	3
BANGGAI	7202	7202051	LUWUK TIMUR	3
BANGGAI	7202	7202082	BALANTAK UTARA	3
DONGGALA	7205	7205041	RIO PAKAVA	3
DONGGALA	7205	7205081	BANAWA SELATAN	3
DONGGALA	7205	7205101	SINDUE TOMBUSABORA	3
DONGGALA	7205	7205131	BALAESANG TANJUNG	3
DONGGALA	7205	7205160	SOJOL	3
DONGGALA	7205	7205161	SOJOL UTARA	3
TOLI-TOLI	7206	7206020	DAMPAL UTARA	3
TOLI-TOLI	7206	7206041	LAMPASIO	3
BUOL	7207	7207021	TILOAN	3
BUOL	7207	7207051	PALELEH BARAT	3
PARIGI MOUTONG	7208	7208010	SAUSU	3
PARIGI MOUTONG	7208	7208062	TAOPA	3
PARIGI MOUTONG	7208	7208063	BOLANO	3
PARIGI MOUTONG	7208	7208064	ONGKA MALINO	3
TOJO UNA-UNA	7209	7209070	TOGEAN	3
TOJO UNA-UNA	7209	7209082	TALATAKO	3
SIGI	7210	7210010	PIPIKORO	3
SIGI	7210	7210050	NOKILALAKI	3
SIGI	7210	7210150	KINOVARO	3
BANGGAI LAUT	7211	7211070	BOKAN KEPULAUAN	3
MOROWALI UTARA	7212	7212030	LEMBO RAYA	3
MOROWALI UTARA	7212	7212090	BUNGKU UTARA	3
MOROWALI UTARA	7212	7212100	MAMOSALATO	3

## Presentase Balita dengan Tinggi Badan di bawah Standar (Stunting)



# PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN ( Food security and Vulnerability Atlas - FSVA ) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020



### Kecamatan Prioritas 1,2 dan 3 Presentase Balita dengan Tinggi Badan di bawah Standar (Stunting)

Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	9. P. STUNTING
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201031	TOTIKUM SELATAN	1
BANGGAI	7202	7202081	BALANTAK SELATAN	1
DONGGALA	7205	7205051	PINEMBANI	1
DONGGALA	7205	7205081	BANAWA SELATAN	1
DONGGALA	7205	7205101	SINDUE TOMBUSABORA	1
DONGGALA	7205	7205140	DAMPELAS	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209061	BATUDAKA	1
TOJO UNA-UNA	7209	7209082	TALATAKO	1
SIGI	7210	7210140	MARAWOLA BARAT	1

Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	9. P. STUNTING
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201042	TINANGKUNG UTARA	2
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201060	BULAGI	2
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201071	BUKO SELATAN	2
BANGGAI	7202	7202061	BUALEMO	2
BANGGAI	7202	7202072	MANTOH	2
POSO	7204	7204012	PAMONA TENGGARA	2
POSO	7204	7204041	LORE TENGAH	2
DONGGALA	7205	7205082	BANAWA TENGAH	2
DONGGALA	7205	7205100	SINDUE	2
DONGGALA	7205	7205161	SOJOL UTARA	2
BUOL	7207	7207051	PALELEH BARAT	2
TOJO UNA-UNA	7209	7209040	AMPANA TETE	2
TOJO UNA-UNA	7209	7209060	UNA-UNA	2
TOJO UNA-UNA	7209	7209080	WALEA KEPULAUAN	2
TOJO UNA-UNA	7209	7209081	WALEA BESAR	2
MOROWALI UTARA	7212	7212070	MORI UTARA	2
MOROWALI UTARA	7212	7212090	BUNGKU UTARA	2
MOROWALI UTARA	7212	7212100	MAMOSALATO	2
PALU	7271	7271041	TAWAELI	2

Nama KAB_KOTA	Kode Kab_Kota	Kode Kec	Nama KEC	9. P. STUNTING
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201030	TOTIKUM	3
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201041	TINANGKUNG SELATAN	3
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201050	LIANG	3
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201051	PELING TENGAH	3
BANGGAI KEPULAUAN	7201	7201061	BULAGI SELATAN	3
BANGGAI	7202	7202021	BATUI SELATAN	3
BANGGAI	7202	7202054	NAMBO	3
BANGGAI	7202	7202060	PAGIMANA	3
BANGGAI	7202	7202062	LOBU	3
BANGGAI	7202	7202070	LAMALA	3
BANGGAI	7202	7202071	MASAMA	3
POSO	7204	7204011	PAMONA BARAT	3
POSO	7204	7204030	PAMONA PUSALEMBA	3
POSO	7204	7204032	PAMONA UTARA	3
DONGGALA	7205	7205080	BANAWA	3
DONGGALA	7205	7205090	LABUAN	3
DONGGALA	7205	7205091	TANANTOVEA	3
DONGGALA	7205	7205130	BALAESANG	3
DONGGALA	7205	7205131	BALAESANG TANJUNG	3
DONGGALA	7205	7205160	SOJOL	3
TOLI-TOLI	7206	7206010	DAMPAL SELATAN	3
TOLI-TOLI	7206	7206032	BASIDONDO	3
BUOL	7207	7207031	BUKAL	3
BUOL	7207	7207040	BUNOBOGU	3
PARIGI MOUTONG	7208	7208010	SAUSU	3
PARIGI MOUTONG	7208	7208022	PARIGI BARAT	3
PARIGI MOUTONG	7208	7208033	SINIU	3
PARIGI MOUTONG	7208	7208050	TOMINI	3
TOJO UNA-UNA	7209	7209010	TOJO BARAT	3
TOJO UNA-UNA	7209	7209020	TOJO	3
SIGI	7210	7210020	KULAWI SELATAN	3
SIGI	7210	7210030	KULAWI	3
SIGI	7210	7210050	NOKILALAKI	3
SIGI	7210	7210060	PALOLO	3
SIGI	7210	7210070	GUMBASA	3
SIGI	7210	7210090	DOLO BARAT	3
SIGI	7210	7210120	SIGI BIROMARU	3
SIGI	7210	7210150	KINOVARO	3
BANGGAI LAUT	7211	7211010	BANGKURUNG	3
BANGGAI LAUT	7211	7211020	LABOBO	3
BANGGAI LAUT	7211	7211040	BANGGAI	3
PALU	7271	7271011	TATANGA	3
PALU	7271	7271040	PALU UTARA	3